



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen BPMSPH Bogor dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sepanjang Tahun 2025, BPMSPH Bogor telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima, serta peningkatan mutu dan keamanan produk hewan. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari nilai rata-rata efektivitas kinerja sebesar 104,62, realisasi anggaran sebesar 96,83%, serta keberhasilan pencapaian sebagian besar indikator kinerja utama di atas target. Seluruh rincian output kegiatan juga berhasil direalisasikan secara optimal, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran BPMSPH Bogor serta dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, dan para pemangku kepentingan. Berbagai penghargaan yang diraih, antara lain sebagai Unit Kerja Informatif, Pelayanan Prima, serta Praktik Baik Inovasi Pelayanan Publik, menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola organisasi.

Akhir kata, kami berharap LKjIP ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, sekaligus referensi dalam penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja BPMSPH Bogor pada tahun-tahun mendatang, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Bogor, 25 Januari 2026



dr. Umar Haryanto, MSc
ahyu Hartawan, MSc
103272006041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Laporan ini menjadi instrumen evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja BPMSPH Tahun 2025.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPMSPH Bogor berperan mendukung terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk peternakan serta ketersediaan pangan hewani yang berkualitas. Dalam mendukung tujuan tersebut, BPMSPH melaksanakan strategi peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) melalui berbagai program dan kegiatan teknis serta manajerial.

Dalam Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPMSPH Bogor mengemban tiga sasaran utama, yaitu: (1) terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima; (2) terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan; dan (3) terwujudnya komoditas produk peternakan yang bermutu. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai pembangunan Zona Integritas (ZI), persentase ketepatan waktu pengujian keamanan produk hewan, serta persentase pengujian mutu produk peternakan.

Selain IKU, pelaksanaan kegiatan BPMSPH juga didukung oleh 9 (Sembilan) Rincian Output (RO), yaitu bantuan ternak unggas, hasil uji keamanan dan mutu produk hewan, sarana kesehatan masyarakat veteriner, layanan BMN, layanan umum, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan pemantauan dan evaluasi, serta layanan manajemen keuangan.

Nilai rata-rata efektifitas BPMSPH pada tahun 2025 sebesar 104,62 dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) IKU mencapai kategori sangat berhasil diatas 100% yakni Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor sebesar 102,5%, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor tercapai 115,91% dan Persentase

Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH 102%.

Seluruh Rincian Output (RO) berhasil dicapai bahkan melampaui target, antara lain bantuan ternak unggas sebesar 12.600 ekor (100%), pengujian keamanan dan mutu produk hewan sebanyak 16.505 produk (120%), penyediaan sarana kesehatan masyarakat veteriner sebanyak 4 unit (133%), serta capaian optimal pada layanan BMN, layanan umum, perkantoran, manajemen SDM, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen keuangan yang seluruhnya mencapai 100%.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja mencapai Rp24.415.046.849,- atau 96,83% dari total pagu sebesar Rp25.253.705.000,-, dengan pengelolaan blokir anggaran yang tetap terkendali. Capaian ini menunjukkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yang sangat baik.

Nilai kinerja anggaran BPMSPH berdasarkan pada aplikasi SMART Kemenkeu, sebesar 95,02 memiliki kinerja dengan kategori "SANGAT BAIK", dengan nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 96,83, nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 93,21.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, BPMSPH Bogor terus memperkuat kualitas manajemen pelayanan dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan manajemen risiko, sistem manajemen mutu, sistem pengendalian intern, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkelanjutan.

Sepanjang Tahun 2025, BPMSPH Bogor berhasil meraih berbagai penghargaan, antara lain peringkat I sebagai Unit Kerja Informatif pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian kategori eselon III, penghargaan Pelayanan Prima, serta penghargaan Praktik Baik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik..

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	4
C. ORGANISASI DAN TATA KERJA	5
D. SUMBER DAYA MANUSIA	6
E. DUKUNGAN ANGGARAN.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan	13
3. Sasaran.....	14
4. Arah Kebijakan dan Strategi.....	15
5. Indikator Kinerja Utama BPMSPH.....	17
B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025.....	18
C. KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN SASARAN KEGIATAN BPMSPH ...	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN	22
B. PENCAPAIAN DAN ANALISIS TAHUN 2025	23
1. Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan	24
2. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	37
3. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	41
E. KINERJA LAIN-LAIN	45
1. Capaian Kinerja RO	45
2. Investasi.....	49
3. Penyelesaian Kerugian Negara	52
4. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	54
5. Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan.....	55
6. Peningkatan SDM.....	56
7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	57
8. Pembinaan Laboratorium	58
9. Uji Profisiensi.....	60
10. Inovasi	61
11. Penghargaan yang Diterima.....	64
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	69
E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TAHUN 2024	70

BAB IV PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. REKOMENDASI	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja	14
Tabel 2. Indikator Kinerja BPMSPH Tahun 2025-2029.....	18
Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 4. Rincioan Output BPMSPH Tahun 2025	20
Tabel 5. Keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPMSPH..	21
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja BPMSPH Tahun 2025	24
Tabel 7. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Tahun 2025 Dibanding dengan Tahun 2024.....	27
Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Tahun 2025 Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 10. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Tahun 2025 Dibandingkan Target Nasional (Ditjen PKH)	28
Tabel 11. Capaian Pembangunan ZI BPMPHS Tahun 2025	33
Tabel 12. Nilai Pembangunan ZI BPMPHS Tahun 2025	33
Tabel 13. Capaian Kinerja Pembangunan ZI Tahun 2025 dibanding dengan Tahun 2024 ..	34
Tabel 14. Perbandingan Capaian Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	34
Tabel 15. Capaian Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	38
Tabel 16. Jumlah Layanan Pengujian Keamanan produk hewan BPMSPH Tahun 2025	38
Tabel 17. Capaian Kinerja Realisasi Sampel Pengujian BPMSPH Bogor Jangka Menengah	39
Tabel 18. Capaian Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	41
Tabel 19. Jumlah Sampel Pengujian Mutu Produk Peternakan	41
Tabel 20. Capaian Kinerja Jangka Menengah Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	44
Tabel 21. Capaian RO BPMPHS Tahun 2025	46
Tabel 22. Capaian Pengujian dan Keamanan Produk Hewan Tahun 2025	48
Tabel 23. Rekap Pembayaran Pelayanan Uji Profisiensi	52
Tabel 24. Data Pembinaan Laboratorium Tahun 2025	59
Tabel 25. Uji Profisiensi Tahun 2025	60
Tabel 26. Revisi Anggaran BPMSPH Tahun 2025.....	67
Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Tahun 2025	68
Tabel 28. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	7
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Grafik 3. SDM Berdasarkan Generasi	8
Grafik 4. Pegawai Berdasarkan Golongan	8
Grafik 5. Alokasi Anggaran BPMSPH Tahun 2025	9
Grafik 6. Nilai Rata-rata Per Unsur Tahun 2025	26
Grafik 7. Perkembangan Nilai IKM dari Tahun 2021-2025.....	27
Grafik 8. Pengujian Mutu Produk Peternakan yang telah dilaksanakan di BPMSPH	42
Grafik 9. Komoditi Pengujian Mutu Terbanyak.....	43
Grafik 10. Capaian PNBP BPMSPH Tahun 2025	54
Grafik 11. Capaian PNBP Tahun 2020 – 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPMSPH	5
Gambar 2. Skoring Capaian Indikator Kinerja.....	22
Gambar 3. Model Kemitraan Sapi Perah.....	51
Gambar 4. Screen Shot Spill B.....	62
Gambar 5. Ruang Tenang.....	63
Gambar 6. Perwakilan Disabilitas pada FKP	63
Gambar 7. Diskusi Pelayanan Inklusif dengan Yayasan Disabilitas Action Indonesia	64
Gambar 8. Bazar Inklusif	64
Gambar 9. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	65
Gambar 10. Penghargaan Pelayanan Prima Tahun 2025	65
Gambar 11. Penghargaan Praktik Baik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Revisi PK.....	74
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2025.....	75
Lampiran 3. Cascading Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BPMSPH Serta Indikator Kinerja BPMSPH 2025	89
Lampiran 4. Tata Cara Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	93
Lampiran 5. Hasil Survei Pengukuran IKM Tahun 2025	94
Lampiran 6. Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Lingkup Ditjen PKH .	99
Lampiran 7. Jenis Pengujian Mutu Produk Peternakan Tahun 2025	100
Lampiran 8. Data komoditas Sampel Pengujian Produk Peternakan	101
Lampiran 9. Data Kelompok Ternak Unggas	103
Lampiran 10. Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK	104
Lampiran 11. Perkembangan Sistem Informasi Spill B (Semula Menjadi)	106
Lampiran 12. Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2025	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional, khususnya menjamin keamanan dan mutu produk hewan yang dikonsumsi masyarakat. Produk hewan seperti daging, ayam, telur dan susu merupakan sumber protein hewani utama yang memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi masyarakat.

Produk hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan optimal, kecerdasan, serta kesehatan masyarakat. Meskipun memiliki nilai gizi dan mutu yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia, produk hewan tergolong bahan yang mudah rusak (*perishable*) dan berpotensi menimbulkan bahaya (*potentially hazardous*). Hal ini disebabkan oleh kerentanannya terhadap pencemaran fisik, kimia, dan biologis yang dapat membahayakan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan, sekaligus menimbulkan keresahan masyarakat, termasuk terkait aspek kehalalan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk hewan bagi masyarakat. Selain itu, keamanan produk hewan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing produk serta mendorong percepatan ekspor.

Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan, termasuk produk hewan yang aman, bermutu dan layak konsumsi.

Dengan meningkatnya kebutuhan produk hewan untuk mendukung MBG, tantangan kesmavet semakin kompleks, meliputi resiko cemaran biologis, kimia dan fisik, penerapan kehalalan produk, pemenuhan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pemenuhan persyaratan ekspor dan impor. Dalam konteks tersebut, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan mutu produk hewan melalui pengujian laboratorium yang akurat, andal, dan terstandar.

Seiring dengan perkembangan regulasi yang mengatur kendali peredaran produk hewan antar daerah di Indonesia pasca wabah penyakit mulut dan kuku, dimana setiap produk yang akan

dilalulintaskan antar daerah diwajibkan melampirkan laporan hasil uji sebagai persyaratan teknis, dengan spesifik parameter uji yang telah diatur di dalamnya. Keputusan Badan Standar Nasional mengatur kriteria mikrobiologi yang harus dipenuhi oleh produk hewan melalui verifikasi hasil pengujian laboratorium yang telah terakreditasi. Sehubungan hal tersebut, dibutuhkan layanan pengujian laboratorium di seluruh wilayah di Indonesia, yang kompeten atau terakreditasi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan dalam mendukung pembangunan subsektor peternakan yang berkelanjutan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Adapun kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus dihadapi oleh BPMSPH diantaranya:

1. Sebagian besar UPT Laboratorium Kesmavet Daerah belum memiliki kemampuan pengujian yang sejalan dengan ruang lingkup parameter keamanan produk hewan yang diperlukan dan sebagian belum terakredistasi sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO 17025;2017.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan penjaminan keamanan produk hewan di Indonesia. Penyediaan produk pangan asal hewan menjadi urusan publik, sehingga memastikan tersedianya akses bagi masyarakat untuk memperoleh pangan asal hewan menjadi tanggung jawab pemerintah
3. Kurangnya keberpihakan publik (*privat sector*) terhadap layanan pengujian laboratorium keamanan produk hewan milik pemerintah, sedangkan disisi lain marak dan berkembangnya layanan laboratorium milik non-pemerintah dapat berpotensi pada kurang optimalnya pengawasan keamanan produk hewan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk menghadapi tantang tersebut, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional, BPMSPH berperan sebagai laboratorium rujukan nasional di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, khususnya dalam pengujian resistensi antimikroba serta penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian laboratorium.

Dalam rangka menjalani peran tersebut, Kepala BPMSPH menandatangani komitmen perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yaitu: (1) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan

Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (2) Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Hewan dan (3) Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu dan 4 indikator kinerja.

Sebagai langkah implementasinya, BPMSPH melaksanakan kegiatan 1) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan dan 2) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, 3) Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH, 4) Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain; 1) meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat mencapai 3,70 sks la linkert pada tahun 2025, meningkat 101% dibandingkan tahun 2024; 2) nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) mencapai 92,73 meningkat 105 %; 3) ketepatan waktu pengujian mencapai 96%; dan 4) Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH sebesar 100%.

Meskipun kinerja BPMPH menunjukkan hasil yang sangat baik, BPMSPH tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Daerah, Perguruan Tinggi/Sekolah, Swasta dan Lembaga Penjamin Halal.

Pada tahun 2025 BPMPH mendapatkan dukungan anggaran APBN sebesar Rp 25.253.705.000 dengan realisasi sebesar Rp 24,483,532,154 atau mencapai 96,95%, terdapat pagu blokir penghematan perjalanan dinas pada anggaran BPMSPH sebesar Rp 40.007.000,-, maka pagu efektif BPMPH menjadi Rp 25.213.698.000,- sehingga realisasi Kementan tahun 2024 berdasarkan pagu efektif sebesar 97,10%

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) BPMSPH Bogor Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPMSPH Bogor tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong BPMSPH di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi BPMSPH Bogor dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPMSPH Bogor dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penjaminan produk pangan asal hewan yang ASUH.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, bahwa BPMSPH berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH) mempunyai tugas melaksanakan pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Dalam pelaksanaan tugasnya, bpmsph menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- d. penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- e. pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba;
- g. pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian untuk mendukung sertifikasi unit usaha produk hewan;
- h. pelaksanaan penyediaan data hasil uji untuk mendukung pelaksanaan analisa risiko produk hewan;

- i. pelaksanaan analisa persyaratan keamanan mutu produk hewan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian produk hewan;
- k. penyelenggaraan uji profisiensi pengujian produk hewan;
- l. pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan penyimpanan koleksi isolat nasional terkait keamanan produk hewan;
- m. pelaksanaan diseminasi, hasil pengujian, keamanan, dan mutu produk hewan;
- n. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPMSPH.

C. Organisasi Dan Tata Kerja

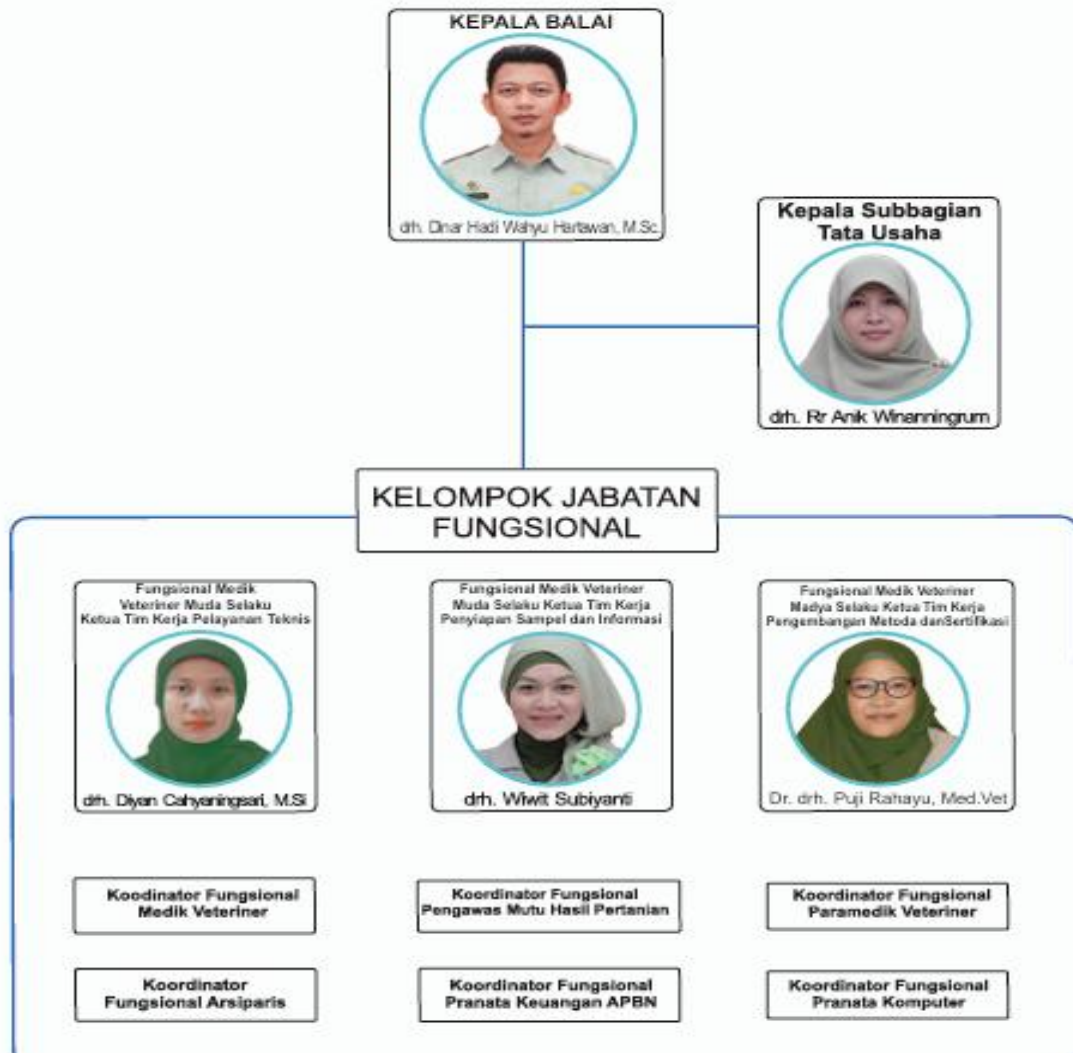
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). BPMSPH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- 1. Kepala Balai;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana

Berikut Susunan Organisasi BPMSPH Tahun 2025

- 1. Kepala Balai : drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc.
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : drh. Rr. Anik Winanningrum
- 3. Ketua Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi : drh. Wiwit Subiyanti
- 4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis : drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si.
- 5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi : DR.drh. Puji Rahayu, Med. Vet.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPMSPH

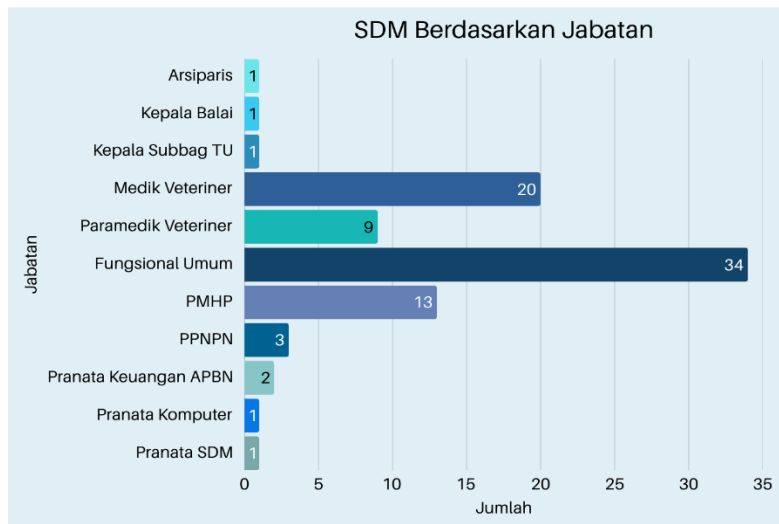


D. Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP SH didukung oleh total 87 sumber daya manusia (SDM). Jumlah tersebut terdiri atas 62 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 7 PPPK paruh waktu, tambahan 5 pegawai baru (4 CPNS dan 1 pegawai mutasi dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak), serta 3 pegawai PPNPN. Pada tahun yang sama, terdapat 2 pegawai yang meninggal dunia. Secara keseluruhan, jumlah SDM BPMP SH meningkat sebesar 13% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 77 pegawai.

Berikut adalah tabel komposisi ASN BPMP SH berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin



Laki-laki
40 orang
(46%)

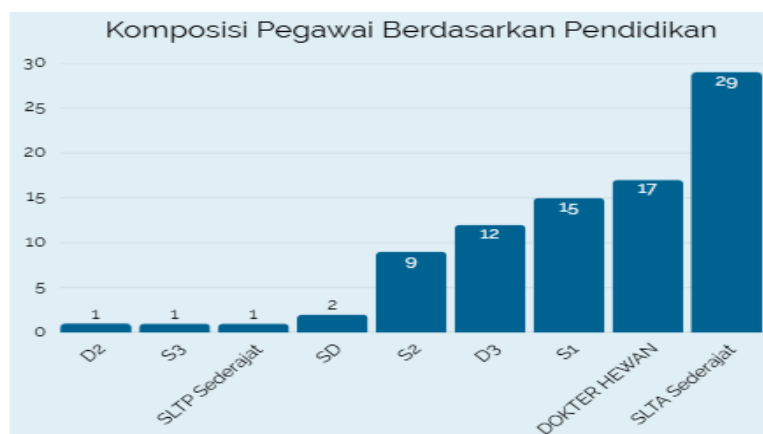


Perempuan
47 orang
(54%)

Total Pegawai
87 orang

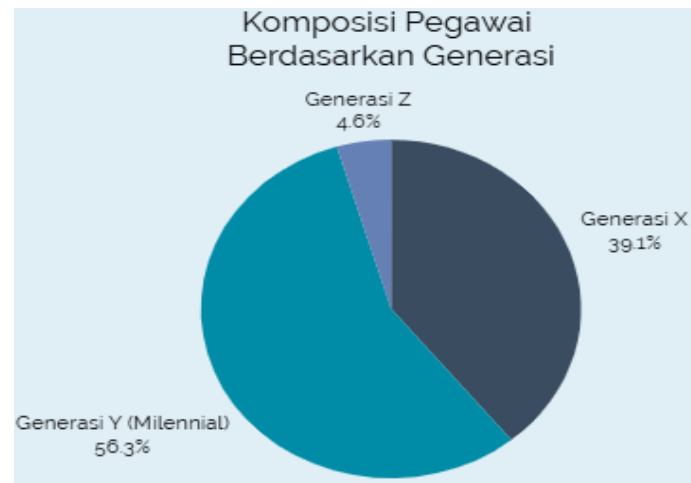
Guna menciptakan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, BPMSPH didukung oleh 87 orang pegawai (data per 31 Desember 2025) terdiri dari 40 orang (46%) pegawai laki-laki dan 47 orang (54%) pegawai perempuan. Berdasarkan jabatan terdiri dari 34 orang Fungsional Umum (39,08%), 20 orang (20%) Medik Veteriner, 13 orang (14,94%) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 9 orang (10,34%) Paramedik Veteriner 3 orang (3,45%) PPNPN, 2 orang (2,3%) Pranata Keuangan APBN, 1 orang (1,15%) Pranata SDM Aparatur, 1 orang (1,15%) Pranata Komputer, 1 orang (1,15%) Arsiparis, 1 orang (1,15%) Analis Keuangan APBN, 1 orang (1,15%) Kepala Subbagian Tata Usaha, dan 1 orang (1,15%) Kepala Balai.

Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



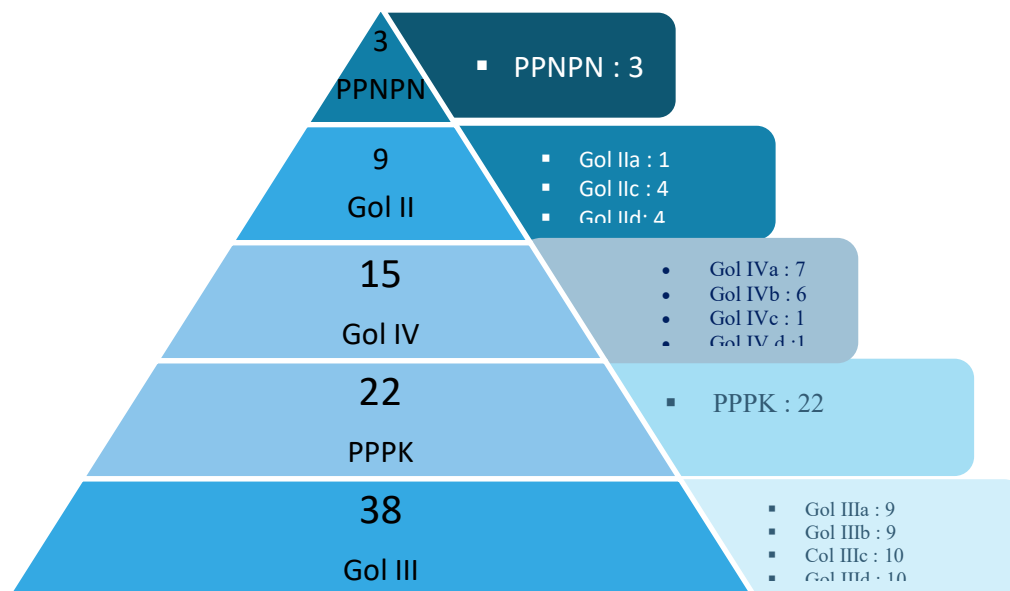
Dari sisi tingkat pendidikan, pegawai dengan latar belakang pendidikan program diploma, DIII kebawah sebesar 51,72 %, program sarjana (S1) sebesar 17,24%, dokter hewan 19,54%, serta program pendidikan lanjutan (S2 dan S3) sebesar 11,49 %.

Grafik 3. SDM Berdasarkan Generasi



Dari sisi level generasi, didominasi oleh generasi Y (1981-1996) sebesar 56,3 %. Adapun komposisi generasi lainnya adalah generasi X (1965-1980) sebesar 39,1 %, dan generasi Z (1997-2012) sebesar 4,6 %.

Grafik 4. Pegawai Berdasarkan Golongan

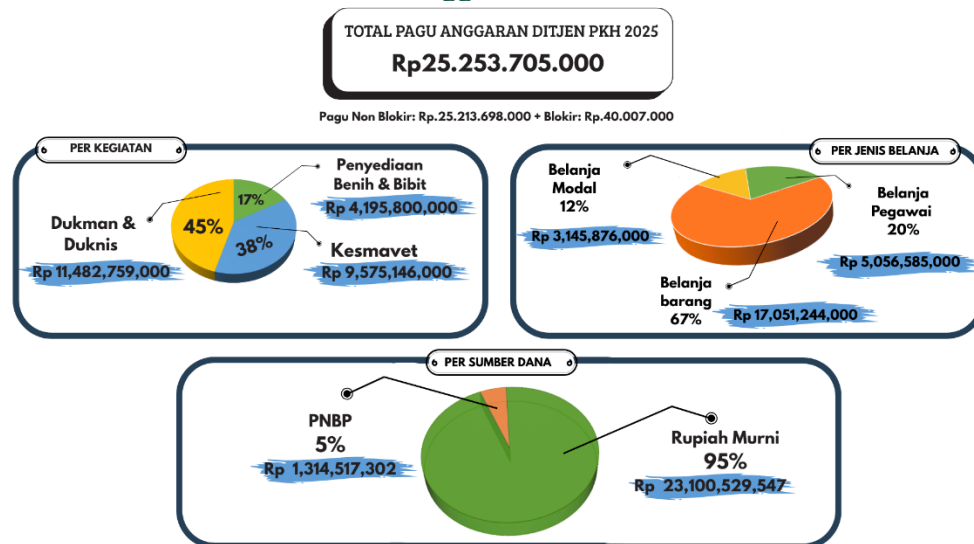


Berdasarkan golongannya, pegawai BPMSPH dengan golongan IV sejumlah 15 orang (17,24%), golongan III sejumlah 38 orang (43,68%), golongan II sejumlah 9 orang (10,34%), PPPK sejumlah 22 orang (25,29%) dan PPNPN sejumlah 3 orang (18%).

Sebaran pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia/generasi, serta kompetensi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif.

E. Dukungan Anggaran

Grafik 5. Alokasi Anggaran BPMSPH Tahun 2025



Sumber dana untuk membiayai Kegiatan BPMSPH Bogor TA.2025 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2025 oleh a.n Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.06.02.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024. BPMSPH Bogor memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp. 17.071.847.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang kemudian mengalami revisi anggaran tahun 2025 menjadi Rp 25.253.705.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan jumlah blokir anggaran sebesar Rp 40.007.000 (Empat Puluh Juta Tujuh Ribu Rupiah).

Perubahan anggaran BPMSPH Bogor pada Tahun 2025 dilakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali yang terdiri dari 20 (dua puluh) kali revisi DIPA dan 2 (Dua) kali revisi POK. Revisi anggaran tersebut membuat jumlah anggaran BPMSPH Bogor juga mengalami perubahan sehingga mengalami revisi PK (**Lampiran 2**).

Proporsi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp 17.051.244.000,- (67,52%), dan berdasarkan kegiatan terdapat pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp 11.482.759.000,- (45,50%). Proporsi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan proporsi terbesar karena untuk pemenuhan pelayanan teknis minimal BPMSPH.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra), Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dibuat pada tahun anggaran 2025 yang diproyeksikan sampai dengan Tahun 2029. Rencana Strategis disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian sehingga lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan BPMSPH yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas Sasembada pangan, dengan sasaran program: 1) terjaminnya mutu komoditas peternakan; 2) terjaminnya keamanan komoditas peternakan, dan 3) terwujudnya tata Kelola birokrasi lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) BPMSPH 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan BPMSPH Bogor selama lima tahun (2025-2029). Dokumen Renstra ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dan arahan di Lingkup BPMSPH dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan BPMSPH periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergi baik di dalam lingkup BPMSPH maupun dengan *stakeholder*.

Rencana Strategis BPMSPH juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP). Oleh karena itu muatan utama Renstra adalah semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam konteks akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN.

Dalam melaksanakan visi dan misi tahun 2025, BPMSPH mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Ditjen PKH. Selaras dengan visi Ditjen PKH “Peternakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”, BPMSPH PKH merumuskan visi

1. Visi dan Misi

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian “Pertanian maju, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

2045” dan Visi, Ditjen PKH “Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia “, BPMSPH merumuskan visi sebagai berikut:

Visi BPMSPH adalah “Laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung peternakan dan kesehatan hewan yang maju serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia”.

Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menetapkan Misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna layanan

Peningkatan kualitas pelayanan publik memastikan bahwa layanan pengujian dan sertifikasi produk hewan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu dan sesuai standar, sehingga memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pelayanan yang baik mendorong pengguna layanan untuk memanfaatkan layanan pengujian tepat prosedur, sehingga mendukung pengendalian mutu dan keamanan produk hewan yang lebih optimal. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna merupakan indikator penting dalam penilaian reformasi birokrasi, SAKIP, dan pembangunan Zona Integritas, yang mencerminkan kinerja organisasi yang akuntabel dan berintegritas. Tingkat kepuasan pengguna layanan menjadi umpan balik yang penting bagi BPMSPH dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap proses, sistem, dan kualitas layanan

2) Mewujudkan tata kelola kelembagaan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan SDM yang kompeten.

Tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan berjalan optimal serta tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel memungkinkan pengelolaan program, anggaran, dan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik kepada pimpinan, pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Tata kelola kelembagaan yang baik dan penguatan kompetensi SDM merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi. SDM yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja akan mampu melaksanakan tugas secara profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Tata kelola yang baik dan SDM yang unggul

menciptakan organisasi yang adaptif, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan strategis secara berkelanjutan.

3) **Menjamin keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan;**

Pengujian keamanan dan mutu produk hewan merupakan instrumen utama untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi dan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Pengujian berbasis laboratorium memungkinkan deteksi dini terhadap bahaya zoonosis, residu obat hewan, logam berat, dan cemaran lainnya yang dapat berdampak tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada kesehatan hewan dan lingkungan. Keamanan dan mutu berbasis pengujian menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar domestik maupun internasional, termasuk dalam mendukung ekspor produk hewan. Penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian berkontribusi pada sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan serta selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

4) **Meningkatkan daya saing produk hewan melalui penguatan sistem manajemen mutu, inovasi layanan, dan fungsi laboratorium rujukan nasional;**

Hasil pengujian yang valid dan diakui menjadi dasar utama dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk hewan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar domestik dan global. Inovasi layanan, baik melalui pengembangan metode pengujian, digitalisasi layanan, maupun peningkatan kecepatan dan kemudahan akses, diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Laboratorium rujukan dengan sistem manajemen mutu yang kuat menyediakan data dan hasil pengujian yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, standar, dan regulasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

5) **Mendukung kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian dalam pembangunan peternakan yang berkelanjutan;**

Dukungan BPMPSH terhadap kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian memastikan seluruh kegiatan pengujian, sertifikasi, dan layanan teknis berjalan searah dan saling mendukung pencapaian sasaran pembangunan peternakan nasional. Kontribusi BPMPSH melalui penyediaan data mutu dan keamanan produk hewan yang akurat menjadi dasar dalam mendorong sistem peternakan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesehatan Masyarakat. Dukungan

terhadap kebijakan Ditjen PKH memungkinkan penguatan fungsi pengawasan mutu dan keamanan produk hewan secara nasional, sehingga potensi risiko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dapat diminimalkan. Kebijakan yang didukung oleh hasil pengujian yang valid dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat akses pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Melalui dukungan kebijakan yang konsisten, BPMPSH berkontribusi dalam menjaga ketersediaan produk hewan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional

6) **Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholders/lembaga terkait.**

Melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan laboratorium lain, BPMPSH dapat memperluas cakupan pengujian, berbagi sumber daya dan keahlian, serta meningkatkan kualitas dan keandalan hasil pengujian. Jejaring kerja yang kuat memungkinkan pertukaran data dan informasi hasil pengujian yang valid dan kredibel, sehingga mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan secara lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga nasional dan internasional, dapat meningkatkan pengakuan terhadap kompetensi dan kapasitas BPMPSH sebagai laboratorium pengujian dan sertifikasi yang andal dan berdaya saing

2. Tujuan

Sebagai penjabaran misi, tujuan BPMPSH adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pengujian dan sertifikasi produk hewan, dan pelayanan lainnya yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik BPMSPH;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas;
3. Meningkatkan jaminan pengujian keamanan produk hewan yang beredar di Masyarakat.
4. Meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengujian produk peternakan untuk mendukung ekspor.
5. Memperkuat peran BPMPSH sebagai laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk peternakan dalam mendukung program Ditjen PKH.
6. Memperkuat harmonisasi, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga/multi sektor.

Tabel 1. Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja

VISI: "Laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang handal, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung peternakan dan kesehatan hewan yang maju serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia."					
No	Misi		Tujuan		Indikator Kinerja
					Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna layanan	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pengujian dan sertifikasi produk hewan, dan pelayanan lainnya yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik BPMSPH	1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan
2	Mewujudkan tata kelola kelembagaan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan SDM yang kompeten	2	Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas	2	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor
3	Menjamin keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.	3	Meningkatkan jaminan pengujian keamanan produk hewan yang beredar di Masyarakat	3	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH
4	Meningkatkan daya saing produk hewan melalui penguatan sistem manajemen mutu, inovasi layanan, dan fungsi laboratorium rujukan nasional.	4	Meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengujian produk peternakan untuk mendukung ekspor	4	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH
					Indikator 1785
5	Mendukung kebijakan Ditjen PKH dan Kementerian Pertanian dalam pembangunan peternakan yang berkelanjutan	5	Memperkuat peran BPMSPH sebagai laboratorium pengujian keamanan dan mutu produk peternakan dalam mendukung program Ditjen PKH	5	Terpenuhinya bantuan benih dan bibit ternak
6	Meningkatkan jejaring kerja dengan stakeholders/lembaga terkait.	6	Memperkuat harmonisasi, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga/multi sektor		

3. Sasaran

BPMSPH memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian yang dicapai melalui 3 (tiga) program dari 9 (lima) program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sasaran Strategis (SS) tersebut yaitu:

- 1) SS 2 : Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan.
- 2) SS 7 : Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi;

Dengan Sasaran Program (SP) sebagai berikut:

- 1) SP 3 : Terjaminnya mutu komoditas peternakan
- 2) SP 4 : Terwujudnya keamanan komoditas peternakan
- 3) SP 9 : Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya untuk mencapai mandat sasaran strategis kementan dan sasaran program Ditjen PKH, BPMSPH memiliki 3 **Sasaran Kegiatan (SK)**, yakni:

- 1) **Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari seberapa jauh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan BPMP SH dan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMS PH) Bogor. Pencapaian nilai IKM dan pembangunan ZI mewujudkan tata kelola birokrasi lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel akan mencapai sasaran strategis berupa Terwujudnya Reformasi birokrasi kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

2) Terpenuhiya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari realisasi jumlah sampel pengujian yang dilakukan tepat waktu dibandingkan dengan total sampel pengujian. Ketepatan waktu penyelesaian pengujian merupakan faktor kunci dalam penjaminan keamanan produk hewan, karena produk hewan bersifat mudah rusak dan berisiko tinggi terhadap cemaran. Hasil uji yang diperoleh secara tepat waktu memungkinkan tindakan pengendalian dilakukan secara cepat dan efektif.

3) Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu

Indikator kinerja sasaran kegiatan diukur dari Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMS PH. Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian mencerminkan cakupan layanan dan efektivitas pengendalian mutu, yang berperan penting dalam memastikan bahwa komoditas produk peternakan yang beredar telah memenuhi standar mutu, aman, dan layak dikonsumsi, sehingga mewujudkan komoditas produk peternakan yang bermutu.

4. Arah Kebijakan dan Strategi

a. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi serta menetapkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, BPMP SH menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan peran sebagai institusi pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Mengarah pada penerapan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan SAKIP, pembangunan Zona Integritas, pengendalian internal, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja.

2) Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Keamanan Produk Hewan

Mengarahkan kebijakan pada peningkatan cakupan dan kualitas pengujian mutu produk peternakan melalui penerapan standar nasional dan internasional, pemeliharaan akreditasi laboratorium, serta penguatan validitas dan ketertelusuran hasil uji guna menjamin keamanan dan mutu produk hewan yang beredar.

3) Peningkatan Kualitas dan Ketepatan Waktu Layanan Pengujian dan Sertifikasi

Memfokuskan kebijakan pada peningkatan kinerja pelayanan pengujian dan sertifikasi yang cepat, tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan publik

4) Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan Nasional

Mengarahkan kebijakan pada dukungan terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk peternakan untuk pasar domestik dan ekspor, melalui penguatan peran BPMPH sebagai laboratorium rujukan dan penyedia data teknis yang kredibel.

5) Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan

Menetapkan kebijakan penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme, serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang modern dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan prima.

6) Sinkronisasi dan Implementasi Program dan Kebijakan Ditjen PKH

Menetapkan arah kebijakan yang memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program BPMPH dengan kebijakan Ditjen PKH dalam rangka mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang maju dan berkelanjutan.

7) Kolaborasi lintas sektor dan jejaring laboratorium

Menetapkan arah kebijakan melalui kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan uji profisiensi, uji banding antar laboratorium, pendidikan dan pelatihan, serta penerapan standar dan sistem penjaminan mutu dan keamanan pengujian

b. Strategi

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan, BPMPH menetapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel melalui penguatan SAKIP, pembangunan Zona Integritas, penderasan informasi publik, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian internal yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi layanan, penanganan pengaduan secara responsif, serta evaluasi berkelanjutan melalui survei kepuasan masyarakat
- 3) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan secara konsisten sesuai standar nasional dan internasional melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, validasi metode uji, serta pengendalian mutu internal dan eksternal.
- 4) Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengujian dan sertifikasi dengan memperbaiki alur layanan, manajemen sampel, dokumentasi dan pengelolaan hasil pengujian serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan untuk memastikan hasil uji dapat digunakan secara tepat waktu.
- 5) Mengembangkan BPMPH sebagai laboratorium rujukan melalui perluasan ruang lingkup pengujian, peningkatan kapasitas sarana prasarana.
- 6) Meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana prasarana pelayanan melalui pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana secara berkala dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- 7) Melaksanakan pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, in house training, sertifikasi kompetensi, serta pemenuhan SDM sesuai standar yang ditetapkan
- 8) Membangun sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja terkait dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, swasta dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam mendukung pelaksanaan program penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan berbasis pengujian.

5. Indikator Kinerja Utama BPMPH

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dengan *cascading* IK yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama BPMPH merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BPMPH dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) sesuai dokumen Renstra BPMPH Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja yang ingin dicapai BPMPH dalam periode 2025-2029 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Indikator Kinerja BPMSPH Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN BPMSPH	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	ISK1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60	3,65	3,65	3,65	3,65
	ISK2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	85	85	85	85
SK2. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	ISK3. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	98%	98%	98%	98%	98%
SK3. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	ISK4. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	98%	98%	98%	98%	98%

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan, yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur capaian. Perjanjian Kinerja mencerminkan komitmen penerima mandat sekaligus kesepakatan antara pemberi dan penerima mandat atas target kinerja tertentu yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, BPMSPH menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja dengan unit eselon di atasnya, yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perjanjian Kinerja tersebut memuat komitmen dan tanggung jawab BPMSPH dalam mencapai target kinerja jangka pendek sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

Perjanjian Kinerja BPMSPH telah ditetapkan pada bulan Desember 2024 dan selanjutnya mengalami beberapa kali penyesuaian, dengan total 6 (enam) kali revisi. Revisi terakhir dilakukan pada bulan Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Adapun Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2.

Kinerja bulanan BPMSPH Tahun 2025

1. Pencapaian target kinerja output kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 25.253.705.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah).
2. Target penyerapan anggaran kumulatif bulan I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX (90%); X (95%); XI (98%); XII (100%);
3. Pelaporan kinerja output fisik bulanan dalam penyerapan anggaran
4. Penyelesaian kerugian negara (KN): 102.000.000,-

Kinerja Tahunan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka disusun sasaran strategis. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai, yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja (IK). Berikut adalah sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja T.A 2025 BPMSPH.

Tabel 3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,60 Skala Linkert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	98 %
3	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	98 %

Perjanjian Kinerja ini harus dilaporkan pencapaiannya pada setiap triwulan, yaitu triwulan I (B03) yang dilaporkan pada awal awal Bulan April 2025, triwulan II (B06) yang dilaporkan pada awal Bulan Juli 2025, triwulan III (B09) yang dilaporkan pada awal Bulan Oktober 2025, dan triwulan IV (B12) yang dilaporkan pada awal Bulan Januari Tahun 2026.

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4, BPMSPH menjabarkannya pada Rincian Output (RO) yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi dengan besaran anggaran per 31 Desember 2025 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. Rincioan Output BPMSPH Tahun 2025

No	Rincian Output (RO)	Pagu	Blokir	Pagu Non Blokir
1	1785.QEO.004 Bantuan Ternak Unggas	4.195.800.000		4.195.800.000
2	1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	6.429.270.000		6.429.270.000
3	1786.RAG.001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.145.876.000		3.145.876.000
4	1787.EBA.956 Layanan BMN	6.130.000	2.130.000	4.000.000
5	1787.EBA.962 Layanan Umum	40.040.000	19.029.000	21.011.000
6	1787.EBA.994 Layanan Perkantoran	11.404.335.000		11.404.335.000
7	1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	13.015.000	8.566.000	4.449.000
8	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.852.000		3.852.000
9	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	15.387.000	10.282.000	5.105.000
	JUMLAH	25.253.705.000	40.007.000	25.213.698.000

Sumber: BPMSPH Bogor 2025

C. Keterkaitan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian dengan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Sasaran Kegiatan BPMSPH

Sasaran Kegiatan (SK) dan Perjanjian Kinerja (PK) BPMSPH disusun mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dari sasaran strategis Kementerian pertanian. Sasaran strategis kegiatan BPMSPH yang disusun mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program atasan di atasnya. *Cascading* sasaran strategis kementarian pertanian, sasaran program Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan dan Sasaran Kegiatan BPMSPH dan indikator kinerja pada lampiran 3.

Secara garis besar hubungan keterkaitan sasaran strategis kemudian dipetakan dalam suatu peta strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan organisasi seperti tabel berikut:

Tabel 5. Keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja BPMSPH

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS) KEMENTERIAN PERTANIAN	SASARAN PROGRAM (SP) DITJEN PKH & INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	SASARAN KEGIATAN (SK) BPMSPH	INDIKATOR KINERJA (IKK)	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	SS7. Terwujudnya Reformasi birokrasi kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi - IKSS7.1 : Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	SP9. Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Lingkup Ditjen PKH yang baik transparan dan akuntabel - IKSP9. Indeks Tata Kelola birokrasi Ditjen PKH	SK1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKSK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60	3,65	3,65	3,65	3,65
				IKSK 2. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	80	85	85	85
2	SS2. Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan - IKSS2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (halaman 78 renstra kementan)	SP3. Terjaminnya mutu komoditas peternakan - IKSP3. Indeks Mutu komoditas peternakan	SK2. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	IKSK3. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	98%	98%	98%	98%	98%
		SP4. Terjaminnya keamanan komoditas peternakan - IKSP4. Indeks keamanan komoditas peternakan	SK3. Terpenuhiya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	IKSK 4. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	98%	98%	98%	98%	98%

Sumber : Renstra Kementan , Ditjen PKH dan PK BPMSPH 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Laporan perkembangan capaian sasaran/kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas keberhasilan maupun ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan dan program yang diamanatkan. Penyusunan laporan tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai, melalui tahapan penetapan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian sasaran.

Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2025 ditentukan berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja menggunakan metode *scoring*, yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) sangat berhasil apabila capaian melebihi 100 persen, (2) berhasil apabila capaian berada pada kisaran 80 sampai dengan 100 persen, (3) cukup berhasil apabila capaian berada pada rentang 60 sampai dengan kurang dari 80 persen, dan (4) kurang berhasil apabila capaian kurang dari 60 persen dari sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan capaian sasaran atau kinerja didasarkan pada perbandingan antara data target dan realisasi kinerja kegiatan.

Gambar 2. Skoring Capaian Indikator Kinerja



Evaluasi kinerja BPMSPH tidak hanya dilakukan melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, tetapi juga dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 terhadap kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, target akhir jangka menengah, serta target Kementerian Pertanian, termasuk analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya. Selain

itu, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan atas capaian kinerja yang belum memenuhi target, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi solusi dan langkah perbaikan pada periode selanjutnya. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen peningkatan kinerja Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta BPMPH secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

B. Pencapaian dan Analisis Tahun 2025

Perjanjian Kinerja BPMPH Tahun 2025 memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMPH) Bogor yang Diberikan; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMPH) Bogor; (3) Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMPH; (4) Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMPH.

Empat indikator kinerja tersebut dievaluasi menggunakan jenis polarisasi *maximize target*, yaitu semakin tinggi capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka semakin baik tingkat kinerjanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Pertanian, capaian indikator kinerja dengan polarisasi *maximize target* dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan persentase capaian IKU

- a. Angka maksimum adalah 120
- b. Angka minimum adalah 0

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menghindari bias penghitungan kinerja

Pencapaian kinerja BPMPH tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja BPMPH Tahun 2025 sebesar 104,90 (Sangat Berhasil). Dari 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja termasuk dalam kategori Sangat Berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja termasuk dalam kategori Berhasil.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja BPMSPH Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	%	Ukuran keberhasilan
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,6	Skala	3,69	102,50%	Sangat berhasil
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	Nilai	92,73	116%	Sangat berhasil
2	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	98	%	96,06	98%	Berhasil
3	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	98	%	100	102%	Sangat berhasil
		Rata-rata	104,62%				

Sumber: BPMSPH Bogor, 2025

Capaian indikator kategori **sangat berhasil** yaitu; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan, 2) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, 3) Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH. Sedangkan indikator kinerja kategori berhasil yaitu Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH.

1. Terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan

1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan

Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2025 menetapkan memiliki sasaran kegiatan berupa terwujudnya birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** atas Layanan BPMSPH Bogor.

Indikator kinerja ini mengukur persepsi para pemangku kepentingan dan pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan BPMSH, sekaligus untuk mengevaluasi tindak lanjut atas hasil survey tahun sebelumnya untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi perbaikan atas survei yang dilakukan.

Penilaian IKM disusun berdasarkan sejumlah unsur, meliputi persyaratan layanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian layanan, biaya atau tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan masukan, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Pada Tahun 2025, realisasi nilai IKM atas Layanan BPMSPH Bogor mencapai **3,69** Skala likert dari target Perjanjian Kinerja sebesar **3,60** skala likert atau setara 102,5% dengan kategori **sangat berhasil**. Tata cara penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil survei pengukuran IKM tahun 2025 masing-masing disajikan pada lampiran 4 dan lampiran 5.

1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini:

Berdasarkan hasil penilaian terhadap **236 responden**, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor pada Tahun 2025 mencapai **102,5 persen**, dengan nilai **3,69 pada Skala Likert**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **3,60 Skala Likert**. Dengan capaian tersebut, indikator kinerja IKM atas Layanan BPMSPH Bogor dikategorikan “**Sangat Baik**”.

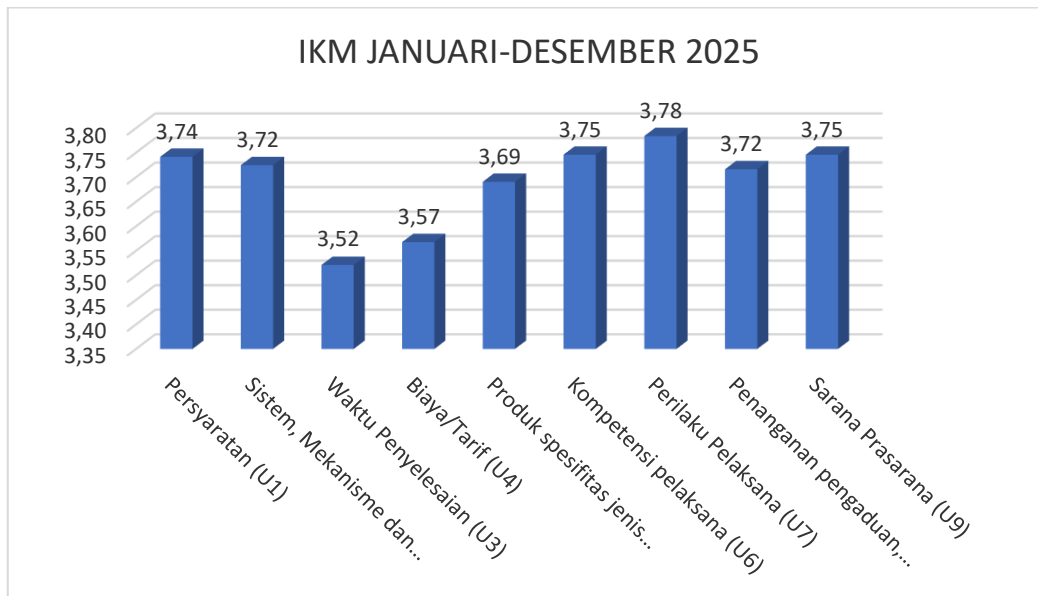
Mengacu pada hasil pengukuran IKM yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap peLayanan BPMSPH Bogor menunjukkan kinerja pelayanan yang **baik dan berkualitas**. Hasil evaluasi unsur pelayanan menunjukkan bahwa **unsur biaya/tarif** memperoleh nilai terendah, sedangkan **kompetensi pelaksana** menjadi unsur dengan nilai tertinggi.

Rincian capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor

Target	Realisasi
3,60 (Skala Linkert)	3,69 (Skala Linkert)
% Capaian	
102,50%	

Grafik 6. Nilai Rata-rata Per Unsur Tahun 2025



Unsur pelayanan dengan nilai **NRR tertinggi** adalah **perilaku pelaksana layanan**. Capaian tersebut didukung oleh upaya BPMSPH Bogor dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis serta penguatan kompetensi pelayanan prima.

Sementara itu, prioritas perbaikan kualitas pelayanan di BPMSPH Bogor difokuskan pada unsur **waktu penyelesaian layanan**, **biaya/tarif**, serta **produk spesifitas jenis layanan** yang masih memperoleh nilai relatif lebih rendah. Biaya/Tarif pengujian BPMSPH telah mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023**. Tingginya tarif pada beberapa jenis pengujian disebabkan oleh penggunaan bahan uji dan peralatan yang bersifat canggih serta sangat spesifik, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait karakteristik dan mekanisme pelayanan pengujian.

Upaya peningkatan **waktu** penyelesaian layanan dilakukan melalui pengembangan sistem aplikasi untuk mendukung proses pengajuan dan penyelesaian layanan secara lebih efektif dan efisien. Sistem sampel perkemasan disarankan pada pengguna jasa agar hasil uji bersamaan. Selain itu, ketersediaan stok bahan uji diupayakan melalui percepatan pemenuhan kebutuhan, dengan pengajuan revisi anggaran untuk pengadaan bahan pengujian.

Perbaikan mekanisme dan Prosedur layanan terus dilakukan melalui aplikasi Spill B untuk mendukung layanan magang, sewa ruang tamu, serta uji profisiensi. Adapun layanan konsultasi terkait pengujian, hasil uji, dan produk layanan dapat diakses melalui **Aplikasi Hallo**

BPMSPH. Berbagai inovasi pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan serta memperkuat efektivitas mekanisme dan prosedur layanan di BPMSPH Bogor.

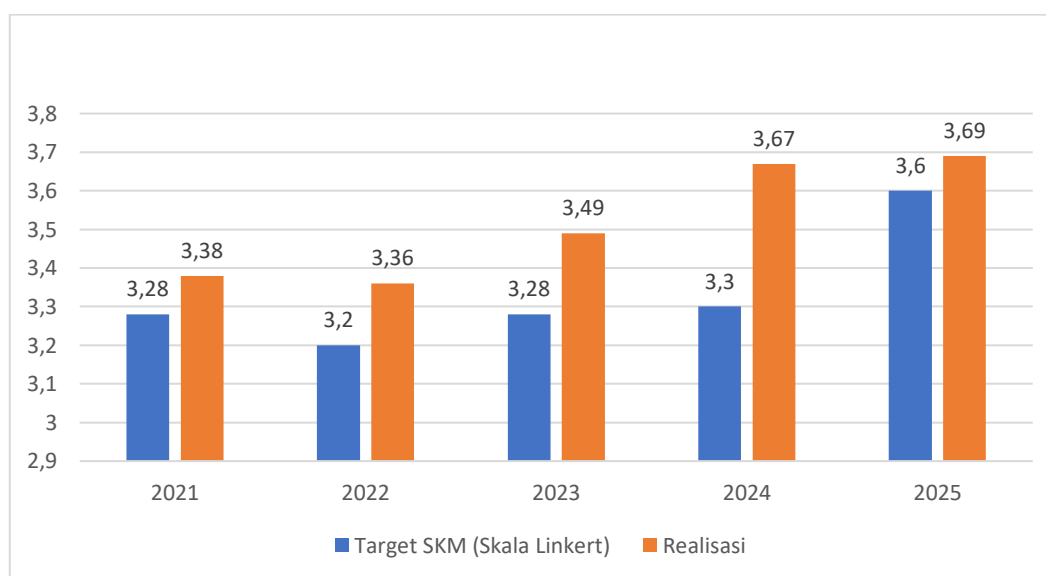
1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya:

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai IKM tahun 2025 (3,69) apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (3,67) adalah sebesar 0,02 poin atau mengalami peningkatan sebesar 0,54 %. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor Tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Tahun 2025 Dibanding dengan Tahun 2024

Target Realisasi SKM	2024	2025	% Realisasi th 2025 thd Th 2024
Target IKM (Skala Linkert)	3,30	3,60	100,59%
Realisasi IKM (Skala Linkert)	3,67	3,69	
% Realisasi terhadap target	111,16%	102,50%	

Grafik 7. Perkembangan Nilai IKM dari Tahun 2021-2025



Terjadi Peningkatan hasil IKM dari tahun 2021 hingga tahun 2025 (dari 3,38 skala likert ke 3,69 skala likert) terjadi kenaikan mutu layanan Balai Hasil survei tahun 2025 menjadi skala mutu layanan “Sangat Baik”. Pada tahun 2025 kenaikan nilai IKM dari 3,67 naik menjadi 3,69. Kenaikan terjadi karena responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPMSPH.

1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan Masyarakat atas layanan BPMPSPH Bogor yang diberikan tahun 2025 sebesar 102,5%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2025-2029), sebesar 101,10% , maka **sangat berhasil**. Secara rinci perbandingan nilai IKM BPMPSPH Bogor pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMPSPH Tahun 2025 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Target Realisasi SKM	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi th 2025 thd target jangka menengah
Target IKM (Skala Linkert)	3,6	3,65	3,65	3,65	3,65	101,10%
Realisasi IKM (Skala Linkert)	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
% Realisai terhadap target	102,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Standar nasional

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Ditjen PKH pada Kepdirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No 13718/KPTS/HK.160/F/12/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 halaman lampiran IKK3.24 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Ditjen PKH sebesar 3,626 skala likert, sehingga apabila dibandingkan dengan target Ditjen PKH, maka **sangat berhasil** mencapai sebesar 101,77%.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMPSPH Tahun 2025 Dibandingkan Target Nasional (Ditjen PKH)

Target Ditjen PKH	Realisasi BPMPSPH
3,626 (Skala Linkert)	3,690 (Skala Linkert)
% Capaian	
101,77%	

1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja:

Unsur utama pelayanan yang dinilai dari masing-masing unit kerja untuk mengetahui kualitas pelayanannya yaitu: (1) persyaratan pelayanan; (2) prosedur pelayanan; (3) waktu pelayanan;

(4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan keluhan; serta (9) Sarana dan prasarana.

Prioritas peningkatan pelayanan di BPMSPH menitik beratkan pada waktu penyelesaian layanan, tarif/biaya dan produk spesifitas jenis layanan.

Pada unsur **waktu pelayanan**, peningkatan kinerja dicapai melalui pemanfaatan Aplikasi Spill B untuk layanan layanan magang/PKL dan pemanfaatan sewa fasilitas (ruang rapat dan kamar tamu) dan Hallo BPMSH untuk layanan konsultasi pengujian, hasil pengujian dan produk layanan lainnya. Implementasi aplikasi tersebut mampu mempercepat proses layanan, memperjelas alur pelayanan, serta mengurangi potensi keterlambatan akibat proses manual. Digitalisasi layanan juga memberikan kepastian waktu penyelesaian kepada pengguna jasa sehingga berdampak positif terhadap persepsi masyarakat atas ketepatan waktu pelayanan.

Dari aspek **biaya/tarif layanan**, peningkatan kinerja terjadi seiring dengan dilaksanakannya sosialisasi langsung melalui forum konsultasi publik yang melibatkan pengguna layanan dan pemangku kepentingan dan sosialisasi tidak langsung melalui web, media social dan WA center. Melalui media tersebut, BPMSPH Bogor memberikan penjelasan secara terbuka mengenai struktur tarif pengujian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni PMK no 85 tahun 2023. Sosialisasi ini mendorong peningkatan pemahaman responden, yang semula memersepsikan biaya layanan relatif tinggi, menjadi memahami bahwa penetapan tarif telah sesuai dengan ketentuan resmi dan mempertimbangkan karakteristik pengujian yang bersifat spesifik dan berteknologi tinggi.

Pada unsur **produk spesifitas layanan**, keberhasilan kinerja ditunjukkan melalui kejelasan spesifikasi dan mutu hasil layanan yang dihasilkan. Dukungan sistem aplikasi serta mekanisme konsultasi layanan membantu memastikan bahwa produk layanan yang diterima pengguna sesuai dengan standar, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk layanan BPMSPH Bogor.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM, BPMSPH mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi personal/pegawai maupun mengirimkan pegawai untuk mengikuti training sehingga output kinerja petugas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan dapat optimal. Pelatihan pelayanan prima dilakukan di Balai dengan menghadirkan narasumber dari luar dan ikut serta dalam pelatihan di Kementerian Pertanian.

Pengembangan metode dilakukan berbasis permintaan pengguna jasa dan kebutuhan masyarakat saat ini. Berupa layanan pengujian keamanan dan mutu produk hewan, Uji profisiensi,

pembinaan dan bimbingan teknis dan layanan pendukung (Konsultasi, magang, pemanfaatan spras dan asset UPT, perpustakaan, informasi dan dokumentasi).

1.1.6 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPMSPH didukung dua komponen utama, yaitu komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang kompeten. Pimpinan dan seluruh pegawai BPMSPH Bogor menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama yang didalamnya termasuk pelayanan prima dan keterbukaan informasi publik. Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk petugas di area pelayanan harus menerapkan SOP yang terstandardisasi melalui SNI/ISO 9001:2015, SNI/ISO 17025:2017, SNI/ISO 17043:2023, SNI/ISO 37001:2016 dan SNI/ISO 45001:2018. Dari pelaksanaan kegiatan yang taat dengan prosedur, dapat dipastikan layanan yang diberikan kepada pelanggan baik eksternal maupun internal akan maksimal atau mencapai titik pelayanan prima. Kondisi tersebut yang menjadikan para pengguna layanan BPMSPH memberikan penilaian yang sangat baik atas kinerja pelayanan para petugas dan pelayanan pengujian yang diberikan.

Komitmen keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja IKM. Dengan banyaknya kanal yang mudah diakses mengenai spesifikasi produk hingga laporan keuangan, pengguna layanan lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komitmen tersebut terus ditingkatkan oleh BPMSPH Bogor, hingga pada tahun 2025 BPMSPH Bogor berhasil meningkatkan predikat unit kerja informatif peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik tingkat Eselon III lingkup Kementerian Pertanian.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPMSPH adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. BPMSPH secara berkelanjutan berupaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi.

Peningkatan sarana disabilitas tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendukung yang memudahkan akses, kenyamanan, dan kemandirian penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan, antara lain penyediaan jalur akses kursi roda, area pelayanan yang mudah dijangkau, penunjuk arah yang jelas, serta penataan ruang layanan yang lebih ramah dan aman. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan tersedianya sarana layanan yang lebih inklusif, masyarakat merasakan peningkatan kenyamanan, kemudahan, serta kepastian dalam proses pelayanan. Hal ini berkontribusi secara

signifikan terhadap meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPMSPH, sekaligus mencerminkan komitmen BPMSPH dalam mendukung prinsip pelayanan prima dan birokrasi yang melayani.

1.1.7 Kendala/ Hambatan dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kendala/hambatan yang di hadapi diantaranya adalah:

- 1) Pengguna jasa tidak secara keseluruhan mengisi IKM, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan survey;
- 2) Pengguna tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak objektif);
- 3) Pengisian IKM masih menggunakan *Gform* karena link pengisian dari Kementerian Pertanian masih *error sistem*, sehingga data SKM tidak terkoneksi langsung ke sistem survei eselon atasnya.

Berdasarkan identifikasi kendala/hambatan, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi secara berkala berkenaan dengan keunggulan Layanan BPMSPH;
- 2) Sosialisasi secara kepada Masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Upaya peningkatan pelayanan;
- 3) Evaluasi tindak lanjut unsur prioritas penilaian terendah secara berkala serta masukan dan saran dari pengguna jasa terkait pelayanan;
- 4) Berkoordinasi secara intens dengan biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian terkait aplikasi SKM.

1.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menetapkan sasaran kegiatan berupa terwujudnya birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja berupa nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor. Indikator kinerja Pembangunan ZI dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPMSPH. Reformasi birokrasi BPMSPH diarahkan pada pembentukan organisasi yang adaptif (*agile*), efektif, efisien, serta berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan di BPMSPH dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kepentingan umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi,

persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, pemberian fasilitas bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), penilaian Zona Integritas terdiri atas dua komponen, yaitu **aspek pengungkit (proses)** dan **aspek hasil** yang difokuskan pada 6 (enam) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek **pengungkit (pengelolaan internal)** terdiri dari dua komponen (pemenuhan dan reform) dinilai berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan eviden implementasi kegiatan pada masing-masing area perubahan. Penilaian tidak hanya memperhatikan ketersediaan dokumen pendukung, tetapi juga menilai konsistensi pelaksanaan, keberfungsian kebijakan, serta dampak terhadap perubahan perilaku dan tata kelola organisasi. Setiap indikator dinilai berdasarkan tingkat kematangan implementasi dan keberlanjutan pelaksanaannya.

Aspek **hasil (outcome)** dinilai melalui capaian indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan potensi korupsi, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Penilaian hasil didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif, seperti hasil survei kepuasan masyarakat, survei persepsi antikorupsi, serta pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Proses penilaian dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri dengan cara silang antar UPT Ditjen PKH. Penilaian mandiri dilakukan oleh unit kerja sebagai bentuk *self-assessment* untuk mengukur kesiapan dan tingkat kematangan pembangunan Zona Integritas

1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Pada tahun 2025, BPMPSH telah melakukan penilaian mandiri Pembangunan ZI oleh evaluator internal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari hasil evaluasi diperoleh hasil bahwa nilai capaian Pembangunan ZI BPMSPH sebesar 92,73 (115,91%) dari target nilai pembangunan ZI BPMSPH tahun 2025 adalah 80, seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Pembangunan ZI BPMPH Tahun 2025

Target	Realisasi
80 (Nilai)	92,73 (Nilai)
% Capaian	
115,91%	

Pencapaian nilai Pembangunan ZI menunjukkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPMPH. Berikut ini hasil penilaian internal pembangunan ZI lingkup BPMPH

Tabel 12. Nilai Pembangunan ZI BPMPH Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Pembangunan ZI Th 2025	%
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	30	27,49	91,64%
	1. Manajemen Perubahan	4	4,00	100%
	2. Penataan Tatalaksana	3,5	3,00	85,71%
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur	5	4,68	93,67%
	4. Penguatan Akuntabilitas	5	5,00	100%
	5. Penguatan Pengawasan	7,5	5,89	78,54%
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4,92	98,33%
	II. Reform	30	29,38	97,92%
	1. Manajemen Perubahan	4	4,00	100%
	2. Penataan Tatalaksana	3,5	3,50	100%
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur	5	5,00	100%
	4. Penguatan Akuntabilitas	5	5,00	100%
	5. Penguatan Pengawasan	7,5	6,88	91,67%
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5,00	100%
	Total komponen pengungkit	60	56,87	94,78%
B.	Komponen Hasil			
	I. Birokrasi yang bersih dan akuntabel:			
	a) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	17,5	16,36	93,50%
	b) Capaian Kinerja lebih baik dari capain kinerja sebelumnya	5	3,75	75,00%
	II. Pelayanan Publik yang prima			
	- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP	17,5	15,75	90,00%
	Total komponen hasil	40	35,8625	89,66%
NILAI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZI		100	92,73	92,73%

Dengan Berita Acara Hasil Evaluasi dari Tim Penilai Internal Ditjen PKH tersaji pada lampiran 6.

1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian Pembangunan ZI tahun 2025 (92,73) apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (88,33) adalah sebesar 4,4 poin atau mengalami peningkatan sebesar 4,87 %. Secara rinci, capaian Pembangunan ZI BPMSPH Bogor Tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Kinerja Pembangunan ZI Tahun 2025 dibanding dengan Tahun 2024

Target Pembangunan ZI	2024	2025	% Realisasi th 2025 thd Th 2024
Target nilai ZI (nilai)	80,00	80,00	104,98%
Realisasi nilai ZI (nilai)	88,33	92,73	104,98%
% Realisasi terhadap target	110,41%	115,91%	

1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Jangka Menengah

Realisasi kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas tahun 2025 sebesar 92,73, sehingga apabila dibandingkan dengan target Renstra (RPJMN) tahun 2029 sebesar 85, maka dapat disimpulkan **sangat berhasil** dengan capaian sebesar 109,09%

Tabel 14. Perbandingan Capaian Pembangunan ZI Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target Pembangunan Zona Integritas	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi th 2025 thd target jangka menengah
Target Pembangunan ZI	80	85	85	85	85	109,09%
Realisasi Pembangunan ZI	92,73					

1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Nasional (Ditjen PKH)

Realisasi kinerja Pembangunan ZI tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama target Ditjen PKH.

1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pembangunan ZI yang melampaui target ditopang oleh penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang terstruktur dan terukur pada seluruh area perubahan. Pimpinan unit kerja menunjukkan komitmen yang kuat melalui penetapan kebijakan, penyediaan sumber daya. Komitmen tersebut tercermin dalam keterkaitan yang jelas antara target kinerja, indikator

- a) Pada Area **Manajemen Perubahan**, keberhasilan didorong oleh efektivitas pengelolaan perubahan melalui pembentukan tim kerja yang berfungsi optimal, penyusunan rencana

aksi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya kerja dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi/internalisasi, serta keteladanan pimpinan, sehingga mampu membangun *ownership* seluruh pegawai terhadap pembangunan Zona Integritas.

- b) Pada Area **Penataan Tatalaksana**, keberhasilan dicapai melalui penyederhanaan dan standardisasi proses bisnis, optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pemanfaatan aplikasi pendukung layanan dan pengawasan. Langkah tersebut berdampak pada meningkatnya efektivitas proses kerja, penurunan potensi maladministrasi, serta peningkatan kecepatan dan kepastian layanan.
- c) Pada Area **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**, keberhasilan dipengaruhi oleh penerapan manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, didukung dengan sistem penilaian kinerja yang objektif serta pemberian *reward and punishment* yang konsisten. Hal ini mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur dalam mendukung pencapaian target Zona Integritas.
- d) Pada Area **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**, keberhasilan ditunjang oleh keterpaduan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja utama ditetapkan secara *SMART* dan selaras dengan sasaran strategis organisasi, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
- e) Pada Area **Penguatan Pengawasan**, keberhasilan dicapai melalui penerapan pengendalian internal yang memadai, dan pengelolaan risiko, serta optimalisasi sistem pengaduan masyarakat melalui halo BPMSPH. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan potensi tindak pidana korupsi.
- f) Pada Area **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, keberhasilan didorong oleh penerapan standar pelayanan yang jelas, inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan masyarakat secara sistematis. Hasil evaluasi pelayanan menunjukkan peningkatan kepuasan dan kepercayaan publik, yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan Zona Integritas.

1.2.6 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja Pembangunan ZI adalah:

- a. Pada **Area Manajemen Perubahan**, kegiatan yang berkontribusi signifikan antara lain pembentukan dan penguatan Tim Pembangunan Zona Integritas, penyusunan dan implementasi rencana aksi ZI, pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas kepada seluruh pegawai. Kegiatan kampanye perubahan, penandatanganan pakta integritas, dan keteladanan pimpinan sebagai *role model* terbukti efektif dalam membangun komitmen dan meningkatkan *ownership* pegawai terhadap target ZI
- b. Pada **Area Penataan Tatalaksana**, kegiatan penyusunan dan pemutakhiran peta proses bisnis, reviu SOP, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi faktor penunjang utama. Digitalisasi proses layanan dan administrasi internal melalui pemanfaatan aplikasi pendukung berdampak pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan konsistensi pelayanan, sekaligus menurunkan potensi maladministrasi
- c. Pada **Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**, keberhasilan ditunjang oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, in house training serta peningkatan pemahaman terhadap nilai integritas melalui kegiatan pembinaan rohani dan etika pelayanan. Implementasi manajemen kinerja berbasis individu, disiplin, dan penerapan mekanisme *reward and punishment* secara konsisten, mendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai.
- d. Pada **Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja**, kegiatan penyelarasan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penetapan indikator kinerja utama yang *SMART*, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik menjadi faktor kunci keberhasilan.
- e. Pada **Area Penguatan Pengawasan**, kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan risiko, pengendalian benturan kepentingan, serta optimalisasi peran Satlak PI dan sistem pengaduan masyarakat berkontribusi dalam mencegah potensi penyimpangan. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara konsisten sehingga memperkuat integritas organisasi.
- f. Pada **Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, kegiatan penetapan dan publikasi standar pelayanan, pengembangan inovasi pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta pengelolaan pengaduan secara responsif menjadi faktor utama peningkatan kualitas layanan. Hasil survei dan umpan balik pengguna layanan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan, yang berdampak pada meningkatnya kepuasan dan kepercayaan publik.

1.2.7 Kendala/ Hambatan dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kendala atau hambatan yang berpotensi menurunkan nilai Pembangunan ZI antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan eviden atau bukti dukung belum berjalan secara optimal karena tim kerja juga memiliki tanggungjawab utama dalam kegiatan pengujian laboratorium serta tugas kedinasan lainnya;
- 2) Masih terdapat kesenjangan pemahaman diantara anggota tim kerja terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Sehubungan dengan hasil identifikasi kendala/hambatan tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencatatan seluruh kegiatan secara sistematis serta membangun bank data/*storage* atau media penyimpanan diawal tahun, sehingga setiap kelompok kerja dapat memanfaatkan sarana tersebut dalam pengumpulan bukti dukung
- 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada tim kerja dan kepada seluruh pegawai.

2. Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan

Sasaran strategis Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH.

Pada Tahun 2025 BPMSPH telah melakukan tugas fungsinya yaitu melakukan pemeriksaan, pengujian, sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Pelaksanaan pengujian ini dilaksanakan kepada sampel pelayanan aktif dan pasif. Pengujian Mutu dan Keamanan Pengujian mutu dan keamanan produk hewan yang berasal dari sampel produk hewan aktif maupun pasif. Sampel produk hewan aktif adalah sampel produk hewan berasal dari program monitoring dan surveilans produk hewan yang dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) BPMSPH ke unit-unit usaha produk hewan. Sampel produk hewan pasif adalah sampel produk hewan berasal dari pengguna layanan yang mengujikan sampel produk hewan ke BPMSPH. Pelaksanaan pengujian dilaksanakan berdasarkan standar waktu layanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) BPMSPH.

2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan dengan indikator kinerja Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total

Permintaan Pengujian di BPMSPH (realisasi 96 %) yang terdiri dari sampel aktif dan pasif. Capaian layanan permintaan pengujian dapat dilihat pada tabel 15. Jumlah layanan pengujian dan jumlah pengujian tepat waktu dapat dilihat pada tabel 16.

Capaian kinerja peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner terhadap indikator keamanan mutu produk hewan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH

Target	Realisasi
98 Persen(%)	96,06 Persen(%)
% Capaian	
98,0%	

Tabel 16. Jumlah Layanan Pengujian Keamanan produk hewan BPMSPH Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Layanan Pengujian(LHU)	Jumlah sampel uji	Jumlah Layanan Pengujian Tepat Waktu (LHU)	Jumlah sampel uji tepat waktu	% Tepat Waktu	Jumlah Layanan Pengujian Terlambat (LHU)	% Keterlambatan
1	Januari	154	1302	154	1302	100,00%	0	0,00%
2	Februari	151	1174	151	1174	100,00%	0	0,00%
3	Maret	184	1147	184	1147	100,00%	0	0,00%
4	April	136	1183	135	1174	99,26%	1	0,74%
5	Mei	123	1038	120	1013	97,56%	3	2,44%
6	Juni	167	1481	164	1454	98,20%	3	1,80%
7	Juli	211	996	197	930	93,36%	14	6,64%
8	Agustus	163	1383	159	1349	97,55%	4	2,45%
9	September	194	1755	186	1683	95,88%	8	4,12%
10	Oktober	181	2440	166	2238	91,71%	15	8,29%
11	November	175	1463	154	1287	88,00%	21	12,00%
12	Desember	215	1143	203	1079	94,42%	12	5,58%
	Total	2054	16505	1973	15830	96,06%		

Data Jumlah layanan pengujian baik aktif dan pasif per bulan Jumlah keseluruhan permintaan tahun 2025 adalah sebanyak 2054 nomor EPI yang tersebar di Laboratorium Cemarkan Mikroba Patogen & Non Patogen, Kimia 1, Kimia 2 & Bioteknologi dan Residu Antibiotika dan AMR. Standar waktu layanan pengujian tercantum di dalam Tarif Uji Laboratorium BPMSPH dengan

waktu layanan yang bervariasi yaitu standar waktu layanan tercepat adalah 7 hari sedangkan paling lama adalah 15 hari tergantung jenis parameter uji. Capaian layanan sebesar **96,06 %** , terdapat keterlambatan penyelesaian layanan pengujian sebesar **3,94%**, hal tsb disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah penumpukan sampel pengawasan, kendala dalam system aplikasi penerimaan layanan IVLab., gangguan teknis sarana dan prasarana laboratorium, maintenance peralatan laboratorium, dan bahan uji tidak tersedia/habis sehingga berada di atas ambang nilai toleransi keterlambatan layanan pengujian yaitu 2%.

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya:

Perbandingan realisasi capaian kinerja keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena adanya pembaharuan indikator kinerja yang berbeda yang merupakan kinerja baru 2025.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.

Dilihat dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, BPMSPH Bogor berhasil mencapai sebesar 96% dari target jangka menengah (tahun 2025-2029). Nilai capaian realisasi pengujian keamanan produk hewan BPMSPH Bogor tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan persentase sebesar 97,96 % dari target jangka menengah. Secara rinci perbandingan nilai capaian sampel pengujian BPMSPH Bogor pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja Realisasi Sampel Pengujian BPMSPH Bogor Jangka Menengah

Target Realisasi Pengujian	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi sd th 2025 thd target jangka menengah
Target (%)	98	98	98	98	98	97,96%
Realisasi (%)	96	-	-	-	-	
% Realisai terhadap target	97,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Nasional.

Target BPMPSH merupakan mandatori dari Berkaitan dengan BPMSPH merupakan laboratorium rujukan nasional, tidak ada data nasional terkait capaian kinerja Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan, maka realisasi kinerja tersebut tahun 2025 BPMSPH tidak dapat dibandingkan.

2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan secara tepat waktu merupakan cerminan efektivitas sistem pelayanan laboratorium yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada mutu. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan layanan, mulai dari penerimaan sampel hingga pelaporan hasil, telah berjalan sesuai standar pelayanan public dan janji layanan yang ditetapkan.

Faktor utama pendukung keberhasilan tersebut Adalah:

- Optimalisasi perencanaan dan pengendalian proses pengujian melalui pengaturan jadwal kerja yang efektif, pemetaan beban kerja penguji, serta pemanfaatan sistem informasi laboratorium (IV Lab). Pengaturan ini memungkinkan distribusi pekerjaan secara proporsional, meminimalkan antrean pengujian, serta mempercepat alur pelayanan tanpa mengurangi ketelitian dan akurasi hasil uji.
- Kesiapan sarana dan prasarana laboratorium didukung dengan pemeliharaan rutin dan kalibrasi peralatan, memastikan tidak terjadinya hambatan teknis yang dapat mengganggu ketepatan waktu penyelesaian pengujian. Ketersediaan bahan habis pakai dan reagen secara memadai juga berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional laboratorium.
- Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara konsisten
Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium secara konsisten melalui pengendalian dokumen, audit internal, serta evaluasi kinerja berkala turut meningkatkan disiplin pelaksanaan prosedur dan kepatuhan terhadap standar operasional.

2.6 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Pengujian

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu, adanya:

- peningkatan Sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan bimbingan teknis memastikan penguji memiliki kemampuan teknis dan manajerial waktu yang baik dalam menyelesaikan pengujian sesuai target.,
- komitmen dari Kepala balai beserta seluruh staf untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diamanahkan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan diawal tahun.

2.7 Kendala/ Hambatan dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersbut terdapat kendala/hambatan adalah adanya keterbatasan bahan uji, penumpukan sampel karena banyaknya permintaan pengujian dari pengguna jasa. Berdasarkan identifikasi kendala/hambatan, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka pencapaian target kinerja adalah pengelolaan manajemen sampel, pembinaan

laboratorium daerah agar dapat melakukan pengujian dan perencanaan pengadaan bahan uji di awal tahun.

3. Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu

Komoditas Produk Peternakan Bermutu adalah hasil produksi peternakan yang telah memenuhi persyaratan **mutu, keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH)** sesuai dengan standar, regulasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak dikonsumsi, diperdagangkan, dan didistribusikan kepada Masyarakat.

Indikator capaian output yang dinilai pada kegiatan Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH adalah Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH.

3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Sasaran kegiatan ini adalah Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH. Adapun capaian kegiatan adalah 102 % atau berhasil dari target sebesar 98 %. Jumlah Permintaan pengujian mutu produk peternakan berasal dari permintaan pengujian pengguna jasa dengan jumlah sampel pengujian sebesar 1834 sampel pengujian dengan capaian keseluruhan permintaan teruji (100 %).

Capaian kinerja terwujudnya produk peternakan yang bermutu terhadap indikator keamanan mutu produk hewan dapat dilihat pada tabel 18 berikut;

Tabel 18. Capaian Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH

Target	Realisasi
98 Persen(%)	100 Persen(%)
% Capaian	
102,0%	

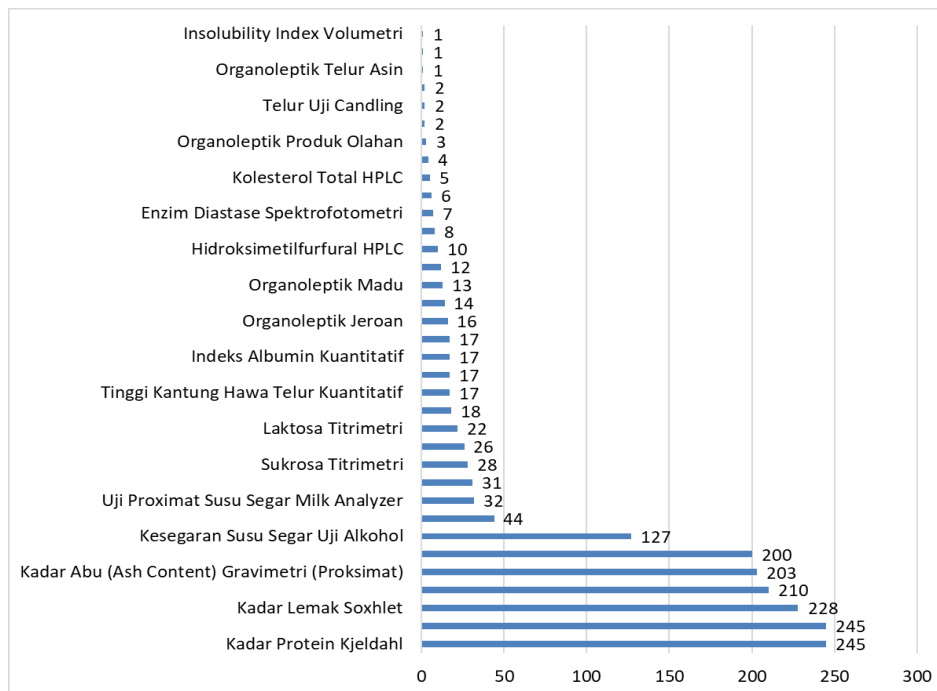
Tabel 19. Jumlah Sampel Pengujian Mutu Produk Peternakan

Bulan	Jumlah Sampel (No. Analisis)	Jumlah Sampel Uji	Jumlah EPI
Januari	45	90	38
Februari	30	53	25
Maret	51	159	26
April	27	58	26
Mei	59	170	35

Juni	92	210	50
Juli	40	70	36
Agustus	73	119	44
September	190	317	31
Oktober	117	304	41
November	61	144	38
Desember	55	140	32
Grand Total	840	1834	422

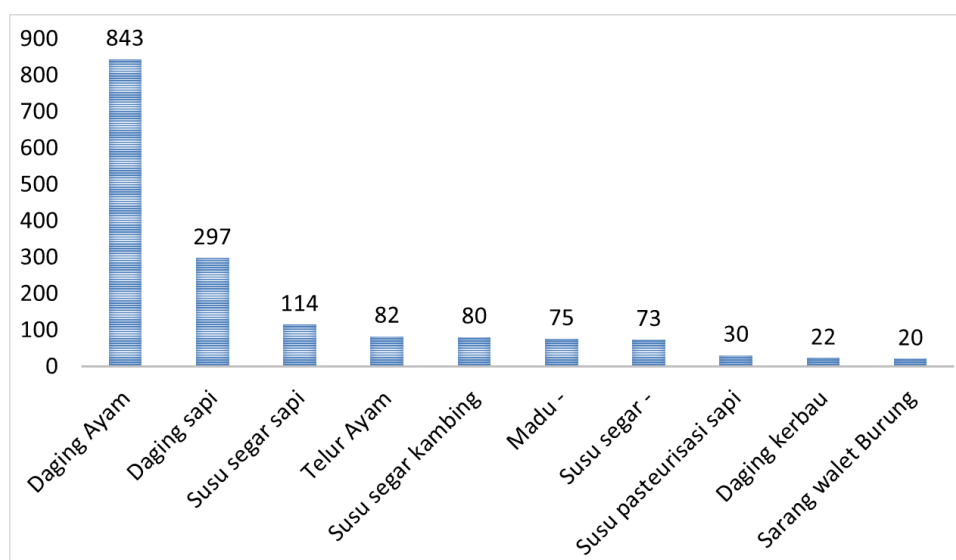
Pada Tahun 2025 jumlah sampel uji harian yang diterima oleh BPMSPH berjumlah **1.843 sampel**. Jumlah sampel fisik yang dikirimkan customer sebanyak 840 sampel dan terbagi menjadi 422 nomor EPI. Dari permintaan pengujian tersebut, **telah dilakukan pengujian sebanyak 100%**, dengan jenis pengujian mutu produk peternakan tersaji pada lampiran 7.

Grafik 8. Pengujian Mutu Produk Peternakan yang telah dilaksanakan di BPMSPH



Pada Tahun 2025 pengujian mutu yang paling banyak diminati oleh customer pasif yaitu pengujian Kadar Protein, Kadar Lemak, Kadar Abu, Kesegaran Susu Segar, dan Uji Proximat Susu Segar. Pengujian Mutu tertinggi pada pengujian Kadar Protein dan Kadar Lemak dengan total 245 sampel uji.

Grafik 9. Komoditi Pengujian Mutu Terbanyak



Pada Tahun 2025 terdapat 51 jenis komoditi yang diujikan dalam pengujian mutu di BPMSPH. Komoditi sampel terbanyak antara lain Daging Ayam, Daging Sapi, Susu Segar Sapi, Telur Ayam, Susu segar kambing, Madu, Susu segar, Susu Pasteurisasi Sapi, Daging Kerbau, dan Sarang burung walet. Data komoditas sampel pengujian tersaji dalam lampiran 8.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena kinerja baru di tahun 2025.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.

Dilihat dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, BPMSPH Bogor berhasil mencapai sebesar 100% dari target jangka menengah (tahun 2025-2029). Nilai capaian realisasi terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu pada tahun 2025-2029 sebesar 102,04 % dari target jangka menengah. Secara rinci perbandingan nilai capaian sampel pengujian BPMSPH Bogor pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada tabel.20 berikut:

Tabel 20. Capaian Kinerja Jangka Menengah Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu

Target Realisasi Pengujian	2025	2026	2027	2028	2029	% Realisasi sd th 2025 thd target jangka menengah
Target (%)	98	98	98	98	98	102,04%
Realisasi (%)	100	-	-	-	-	
% Realisai terhadap target	102,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Standar nasional.

Sehubungan tidak ada data nasional terkait target kinerja kegiatan meningkatnya sarana kesehatan masyarakat veteriner secara nasional ini, maka realiasi kinerja tersebut tahun 2025, BPMSPH belum dapat dibandingkan.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan kinerja **pengujian mutu** yang mencapai **100 persen** merupakan hasil dari penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang konsisten, didukung oleh ketersediaan sumber daya, sarana prasarana, serta penguatan kompetensi personel pengujian. Pencapaian tersebut di dorong oleh:

- Penerapan **standar operasional prosedur (SOP) pengujian** secara disiplin, pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium, serta pelaksanaan pengendalian mutu internal dan eksternal secara berkelanjutan. Seluruh tahapan pengujian dilaksanakan sesuai dengan metode baku dan standar yang ditetapkan, sehingga menjamin keandalan hasil uji dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.
- sumber daya manusia, keberhasilan ini didukung oleh kompetensi analis yang tersertifikasi serta pelaksanaan pelatihan teknis laboratorium secara berkala guna memastikan penguasaan metode uji terkini dan
- pemanfaatan peralatan laboratorium secara optimal, ketersediaan bahan uji dan pemeliharaan peralatan secara rutin dan terjadwal
- sistem informasi layanan pengujian berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan permohonan uji, pemantauan proses pengujian, serta pengendalian waktu penyelesaian. Hal ini memungkinkan pengujian mutu dilaksanakan secara lebih terencana, terukur, dan akuntabel

Dengan sinergi antara penerapan sistem mutu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan peralatan laboratorium serta pemanfaatan teknologi informasi, kinerja pengujian

mutu BPMSPH Bogor pada Tahun 2025 berhasil mencapai target secara optimal, sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna layanan terhadap kualitas hasil pengujian.

3.6 Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan kegiatan Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH:

1. Peningkatan SDM pelaksana layanan dengan pelatihan teknis maupun pelayanan prima.
2. Peningkatan inovasi pelayanan administrasi (seperti aplikasi Spill B, Hallo BPMSPH) maupun inovasi teknis (pengembangan metode) dan sarana layanan lainnya.
3. Peningkatan promosi layanan balai baik secara langsung maupun media sosial, web maupun sarana komunikasi lainnya.

3.7 Kendala/ Hambatan dan Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kendala/hambatan yang di hadapi diantaranya adalah:

1. Instrumen dan Peralatan sebagian besar impor dan tidak *ready stock* serta adanya ketidaksesuaian data dan informasi mengenai spesifikasi barang.
2. Permintaan pengujian baru yang belum dapat dilakukan di BPMSPH.

Berdasarkan identifikasi kendala/hambatan, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Menyiapkan perencanaan penyusunan spesifikasi teknis lebih awal untuk barang/peralatan sarana dan prasarana laboratorium
2. Mengupayakan pengadaan menggunakan *E-purchasing*/E-katalog
3. Melakukan pengembangan metode baru terkait pengujian berdasarkan kebutuhan pasar

E. Kinerja Lain-lain

Selain capaian kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja diatas, BPMSPH juga memiliki kinerja lainnya antara lain sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja RO

Capaian Kinerja RO BBPTUHPT Baturraden TA 2025 (anggaran dan fisik) dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Capaian RO BPMPH Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Belanja				Keluaran				
		Pagu (Rp)	Pagu blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	%	TVRO		RVRO		%
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	25.253.705.000	40.007.000	24.415.855.739	96,68%					
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	4.195.800.000	-	3.941.154.954	93,93%					
1785.QEO	Bantuan Produk dan Peralatan[Base Line]	4.195.800.000		3.941.154.954	93,93%					
1785.QEO. 004	Bantuan Ternak Unggas	4.195.800.000		3.941.154.954	93,93%	12.600	ekor	12.600	ekor	100%
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.575.146.000	-	9.314.289.922	97,28%					
1786.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	6.429.270.000		6.179.562.193	96,12%					
1786.QJA. 001	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	6.429.270.000		6.179.562.193	96,12%	11.750	produk	16.505	produk	120%
1786.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.145.876.000		3.134.727.729	99,65%					
1786.RAG. 001	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.145.876.000		3.134.727.729	99,65%	3	unit	4	unit	133%
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen									
1787	Dukungan Manajmen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH	11.482.759.000	40.007.000	11.160.410.863	97,53%					
1787.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	11.450.505.000	21.159.000	11.158.549.863	97,63%					
1787.EBA. 956	Layanan BMN	6.130.000	2.130.000	581.000	14,53%	4	Layanan	4	Layanan	100%
1787.EBA. 962	Layanan Umum	40.040.000	19.029.000	14.572.320	69,36%	1	Layanan	1	Layanan	100%
1787.EBA. 994	Layanan Perkantoran	11.404.335.000		11.143.396.543	97,71%	2	Layanan	2	Layanan	100%
1787.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	13.015.000	8.566.000	500.000	11,24%					
1787.EBC.9 54	Layanan Manajemen SDM	13.015.000	8.566.000	500.000	11,24%	62	Layanan	62	Layanan	100%
1787.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.239.000	10.282.000	1.361.000	15,19%					
1787.EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.852.000		-	0,00%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
1787.EBD. 955	Layanan Manajemen Keuangan	15.387.000	10.282.000	1.361.000	26,66%	12	Dokumen	12	Dokumen	100%

1.1 Bantuan Ternak Unggas

Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan, kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dalam rangka mendukung program pangan merah putih, mendukung program makan bergizi gratis, dan meningkatkan populasi serta produksi ternak ayam petelur. Fasilitasi pengembangan ayam petelur bertujuan untuk mewujudkan kemandirian produksi pangan asal ternak di setiap desa yang dilakukan melalui introduksi skema klusterisasi peternakan di masing-masing desa yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan protein hewani rumah tangga sekaligus dapat berkontribusi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang mendapatkan penugasan untuk pelaksanaan pengadaan bantuan pengembangan ayam petelur 2025. Wilayah kegiatan BPMSPH meliputi 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Banten dan Lampung. Wilayah provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak 10 kelompok dan Kabupaten Pandeglang 7 Kelompok. Wilayah Propinsi Lampung yaitu Kabupaten Tulang Bawang 2 Kelompok dan Lampung Timur 2 kelompok. **Target** distrisbusi bantuan ternak unggas ke kelompok peternak sebesar **12.600** ekor dengan **capaian realisasi** kegiatan sebanyak **12.600 ekor** ayam pulet umur 16 minggu terdistribusi bersamaan dengan paket kandang, pakan, obat-obatan dan vitamin. Sedangkan capaian realisasi anggaran untuk bantuan ternak unggas tercapai 93,93%. Data kelompok ternak dan jumlah bantuan ternak tersaji pada lampiran 9.

1.2 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan terdiri dari sampel aktif berupa monitoring dan surveilans produk hewan dan AMR (Anti Mikrobial Resisten) dan sampel pasif yang berasal dari unit usaha. Realisasi pengujian keamanan dan mutu proguk hewan tahun 2025 tercapai **16.505** produk dari **target 11.750** produk setara **120%** dengan realisasi anggaran untuk indicator kinerja ini sebesar **96,12%**. Capaian pengujian keamanan produk hewan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 22 berikut;

Tabel 22. Capaian Pengujian dan Keamanan Produk Hewan Tahun 2025

Bulan	Pengujian		Total	Jumlah sampel		Total	No EPI		Total
	Aktif	Pasif		Aktif	Pasif		Aktif	Pasif	
Januari	-	1.302	1.302	-	489	489	-	151	151
Februari	29	1.145	1.174	13	532	545	4	150	154
Maret	-	1.147	1.147	-	436	436	-	149	149
April	186	997	1.183	90	455	545	9	152	161
Mei	97	941	1.038	71	366	437	4	136	140
Juni	158	1.323	1.481	79	492	571	7	182	189
Juli	8	988	996	2	384	386	1	153	154
Agustus	168	1.215	1.383	164	540	704	6	196	202
September	191	1.564	1.755	171	654	825	7	181	188
Oktober	589	1.851	2.440	309	640	949	48	162	210
November	305	1.158	1.463	152	527	679	17	168	185
Desember	229	914	1.143	79	372	451	10	178	188
Grand Total	1.960	14.545	16.505	1.130	5.887	7.017	113	1.958	2.071

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tim teknis yang terdiri dari fungsional khusus dan staf pelaksana lainnya. Pengambilan sampel oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang sudah tersertifikasi serta pengujian oleh tim teknis yang secara khusus ahli dan kompeten dibidang pengujian masing-masing. Penggunaan *collaboration tool* dengan pihak mitra (*fleming fund, FAO, Singapore Food Agency dan UK Deputy Chief Veterinary Officer*) terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui *sharing knowledge* sehingga BPMSPH dapat menghemat anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM.

1.3 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator capaian output yang dinilai pada kegiatan meningkatnya sarana kesehatan masyarakat veteriner adalah berupa alat-alat laboratorium untuk pengujian keamanan dan mutu produk hewan dan penunjangnya antara lain: **UHPLC, Milk Analyzer (Lactoscan), Kendaraan Operasional Sarana Monitoring Surveillance Keamanan Mutu Produk Hewan Lab Kesmavet dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik**. Sarana prasarana tersebut dipergunakan untuk menunjang capaian IKU terpenuhinya permintaan pengujian keamanan mutu produk hewan dan terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu tercapai mutu. Realisasi kegiatan pemenuhan sarana kesehatan masyarakat veteriner tahun 2025 tercapai 4 unit dari target 3 unit.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh kompetensi tim pengadaan dalam merencanakan pekerjaan di awal tahun anggaran, sehingga meskipun proses penganggaran sempat mengalami refocusing dan dipulihkan kembali, pengadaan sarana laboratorium pengujian terwujud.

1.3 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Kegiatan layanan dukungan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun dukungan layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya memiliki 6 (enam) target layanan yang terdiri dari layanan BMN 4 (empat) layanan, layanan umum 1 (satu) layanan, layanan perkantoran 2 (dua) layanan, layanan manajemen SDM 62 (enam puluh dua) layanan, layanan pemantauan dan evaluasi 1 (satu) dokumen dan layanan manajemen keuangan 12 (empat) dokumen.

Realisasi fisik kegiatan layanan dukungan manajemen tahun 2025 dibandingkan target tercapai 100% dengan capaian anggaran sebesar 97,53%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 disebabkan antara lain karena adanya SDM teknis dan administrasi yang berkompeten sehingga perhitungan belanja pegawai dihitung secara seksama sehingga terserap optimal

2. Investasi

Pada Tahun 2025, BPMSPH memiliki tugas tambahan terkait peningkatan populasi sapi perah/pedaging melalui fasilitasi kegiatan Investasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Pedaging. Dalam hal ini, tugas BPMSPH melakukan pengawalan terhadap keberhasilan program kegiatan tersebut melalui pendampingan terhadap unit usaha yang akan melakukan investasi sapi perah. Pendampingan ini berupa bantuan teknis berupa membantu untuk mencari skema yang pas bagi unit usaha yang akan melakukan investasi dan juga membantu mencari rekan kemitraan pemeliharaan untuk pelaku usaha Investasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Pedaging. Adapun pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab BPMSPH adalah

1. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk sapi perah
2. PT. Indokuat Sukses Makmur Tbk untuk sapi perah
3. PT Liandra Pangan Jaya untuk sapi perah.

Tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Investasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Pedaging.
2. Memberikan Informasi dan bahan pertimbangan dalam Penyelesaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan layanan Membuat Fasilitasi Kegiatan Investasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Pedaging guna Meningkatnya jumlah populasi sapi perah dan sapi pedaging melalui investasi bidang peternakan.

Adapun beberapa perusahaan tersebut yang telah berkomitmen terhadap pengembangan jumlah populasi sapi perah melalui Program Investasi ini meliputi PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sapi perah); PT. Indokuat Sukses Makmur (sapi perah); dan PT Liandra Pangan Jaya (sapi perah).

Informasi yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya yaitu :

1. Skema investasi sapi perah yang mencakup informasi tentang rencana investasi, lokasi, dan manfaat yang diharapkan.
2. Data dan informasi tentang kondisi peternakan sapi perah, termasuk informasi tentang kesehatan hewan, infrastruktur, dan pasar.
3. Data dan informasi terkait rencana dan jadwal joinshipment import sapi
4. Rencana skema kerja sama kemitraan pemeliharaan antara investor untuk mengembangkan peternakan sapi perah.

Alur Kerja Sama Kemitraan dalam rangka Program Penambahan Sapi Perah dan Sapi Pedaging meliputi **koordinasi kemitraan** merupakan kegiatan Inventarisasi model dan dokumentasi skema kemitraan, **sosialisasi skema kemitraan** merupakan kegiatan Sosialisasi skema kemitraan oleh koperasi dan/atau pelaku usaha calon mitra potensial dan Sosialisasi kepada pelaku usaha yang telah memberikan komitmen dukungan penambahan populasi, **business matching** merupakan kegiatan Pendampingan investor/calon investor dan calon mitra potensial dalam penjakan kemitraan, **tandatangan kerjasama** merupakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Sapi Perah atau Sapi Pedaging, dan **pelaksanaan kemitraan** merupakan kegiatan Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Kemitraan Usaha Sapi Perah atau Sapi Pedaging.

Berikut disampaikan beberapa perkembangan terkait pengawalan dan pendampingan dalam program investasi:

1. PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sapi perah) saat ini sudah memutuskan untuk melakukan tender dalam rangka joinshipment untuk pengiriman sapi impor. Saat ini sudah ada perkembangan yang signifikan, yaitu sudah akan dilakukan Mou dengan PT. Lunar sebagai pemenang tender untuk pemasukan sapi perah milik PT. Indofood CPB. Sementara itu untuk kemitraan pemeliharaan, PT. Indofood sudah melakukan kunjungan lapang ke Peternakan sapi Kunak, diantaranya yaitu Dairy Farm milik pak Rusdy. Perkembangan akhir kemitraan pemeliharaan akan dilaksanakan Mou dengan Peternak2 di Kunak.

2. PT. Indokuat Sukses Makmur (sapi perah) saat ini sudah memutuskan untuk melakukan tender dalam rangka joinshipment untuk pengiriman sapi impor. Saat ini sudah ada perkembangan yang signifikan, yaitu sudah akan dilakukan Mou dengan PT. Lunar sebagai pemenang tender untuk pemasukan sapi perah milik PT. Indofood CPB. Sementara itu untuk kemitraan pemeliharaan, PT. Indofood sudah melakukan kunjungan lapang ke Peternakan sapi Kunak, diantaranya yaitu Dairy Farm milik pak Rusdy. Perkembangan akhir kemitraan pemeliharaan akan dilaksanakan Mou dengan Peternak2 di Kunak.
3. PT. Liandra Pangan Jaya (sapi perah) sudah memiliki perkembangan investasi yang sangat signifikan, yaitu sudah melakukan penandatanganan Kerjasama baik dengan joinshipment dan juga untuk mitra pemeliharaan. MOU sudah dilakukan yaitu dengan Dairy Farm kunak untuk mitra pemeliharaan dan MOU dengan PT. Lunar untuk joinshipment pemasukan sapi perah ke Indonesia.

Kendala terhadap realisasi terkait program investasi ini telah disampaikan setiap minggunya ke Ditjen PKH melalui rapat progress investasi. Telah disampaikan juga kepada para investor PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (sapi perah) dan PT. Indokuat Sukses Makmur (sapi perah) serta PT. Liandra Pangan Jaya bahwa BPMSPH jg berusaha utk menghindarkan dari pengetatan rekomendasi teknis, bila terus menerus tidak ada progres riil.

Untuk memudahkan para investor dalam memahami dan memilih model kemitraan yang tepat dengan peternak, koperasi dan/atau pelaku usaha, BPMSPH menyampaikan skema program sebagai berikut:



Gambar 3. Model Kemitraan Sapi Perah

3. Penyelesaian Kerugian Negara

Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Hasil Audit Kinerja Program pada BPMSPH Tahun Anggaran 2023 **Nomor R.178/PW.130/G.5/07/2024**, terdapat temuan audit yang menyatakan bahwa BPMPSH memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kerugian negara sebesar Rp123.000.000,-. Kerugian tersebut terjadi sebagai dampak dari perubahan regulasi terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada ketentuan sebelumnya, yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016** pelaksanaan Uji Profisiensi (UP) tidak dikenakan biaya (gratis). Namun, berdasarkan peraturan terbaru, yaitu **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023** tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian, pelaksanaan UP dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,- per komoditi. Dikarenakan belum diperolehnya informasi mengenai perubahan regulasi tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan, maka peserta UP tidak dipungut biaya, sehingga berakibat pada terjadinya potensi kerugian negara sebesar Rp123.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, BPMPSH telah mengirimkan surat penagihan kepada seluruh peserta Uji Profisiensi. Rekapitulasi pembayaran dari peserta UP disajikan pada

Tabel 23. Rekap Pembayaran Pelayanan Uji Profisiensi

No.	Lab Peserta UP TA 2023	Jenis UP yang Diikuti			Keterangan
		Residu Antibiotika	Boraks	Formalin	
1	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	V			Lunas
2	Balai Veteriner Medan	V	V	V	Lunas
3	Balai Veteriner Bukittinggi	V	V	V	Lunas
4	Balai Veteriner Lampung	V	V	V	Lunas
5	Balai Veteriner subang	V	V	V	Lunas
6	Balai Besar Veteriner Wates	V	V	V	Lunas
7	Balai Besar Veteriner Denpasar	V	V	V	Lunas
8	Balai Veteriner Banjar Baru	V	V	V	Lunas
9	Balai Besar Veteriner Maros	V	V	V	Lunas
10	UPTD Pengujian Mutu produk Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov SUMBAR	V	V	V	Belum
11	Laboratorium Veteriner dan Klinik hewan Provinsi Riau		V	V	Belum
12	UPTD Balai pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat veteriner dan klinik Hewan Provinsi Jambi		V	V	Belum
13	Laboratorium veteriner Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			V	Lunas
14	UPTD Laboratorium Kesmavet Dinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi Bengkulu		V	V	Belum

No.	Lab Peserta UP TA 2023	Jenis UP yang Diikuti			Keterangan
		Residu Antibiotika	Boraks	Formalin	
15	UPTD RPH dan lab Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian, dan Perikanan Kota metro		V	V	Belum
16	Pusat Pelayanan kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta	V	V	V	Lunas
17	Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Cikole	V	V	V	Belum
18	Laboratorium kesehatan masyarakat veteriner Balai veteriner Boyolali Jateng	V	V	V	Belum
19	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pati BAVET Semarang-Dinas Keswan Propinsi Jateng	V	V	V	Belum
20	UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Tuban Provinsi Jawa Timur		V	V	Belum
21	UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Malang		V	V	Lunas
22	UPTD Laboratorium Keswan dan kesmavet Dinas Pangan & Pertanian Kabupaten Sidoarjo		V	V	Belum
23	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dinas Pertanian Propinsi Bali		V	V	Belum
24	UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa tenggara Barat.	V	V	V	Belum
25	UPT Pelayanan Keswan, Kesmavet, dan Klinik Hewan Dinas Pangan , Peternakan dan Keswan Provinsi Kalimantan Barat	V	V	V	Lunas
26	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan provinsi Kaltim		V	V	Belum
27	UPTD laboratorium Keswan dan Kesmavet Dinas Pertanian dan Peternakan daerah Provinsi Sulawesi Utara.		V	V	Belum
28	UPT Pengujian Mutu Produk Peternakan (UPT PMPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan	V	V	V	Lunas
29	UPTD laboratorium Veteriner dan PUSKESWAN Provinsi Papua		V	V	Belum
30	laboratorium kesmavet Magelang	V	V	V	Belum
31	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Prov Banten	V	V	V	Lunas
32	UPTD Laboratorium Veteriner. Dinas Peternakan Aceh.		V	V	Belum
33	BVET Jayapura		V	V	Lunas

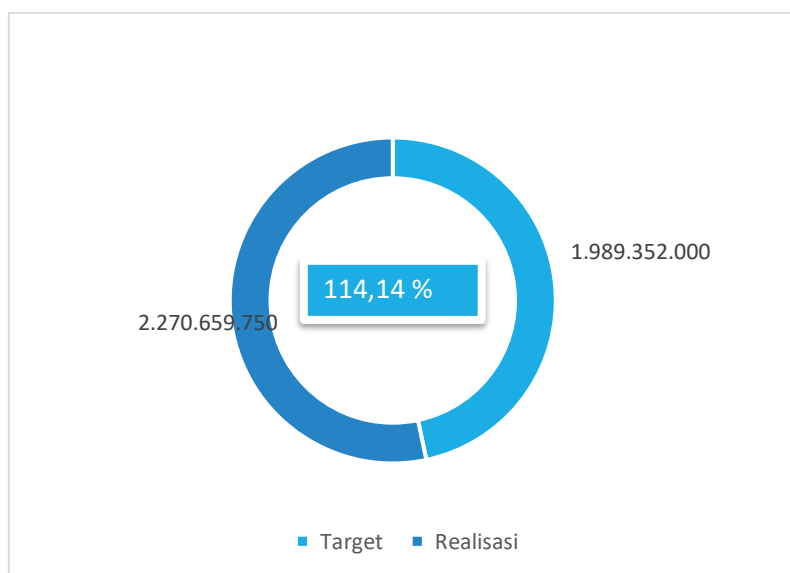
Berdasarkan data pada tabel tersebut, hingga tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 16 (enam belas) lab peserta UP telah menyelesaikan pembayaran dengan total sebesar Rp 63.000.000, masih ada 17 (tujuh belas) Lab peserta UP yang masih belum menyelesaikan pembayaran, sehingga sisa kerugian negara yang masih harus diselesaikan tercatat sebesar Rp 60.000.000,-

4. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak

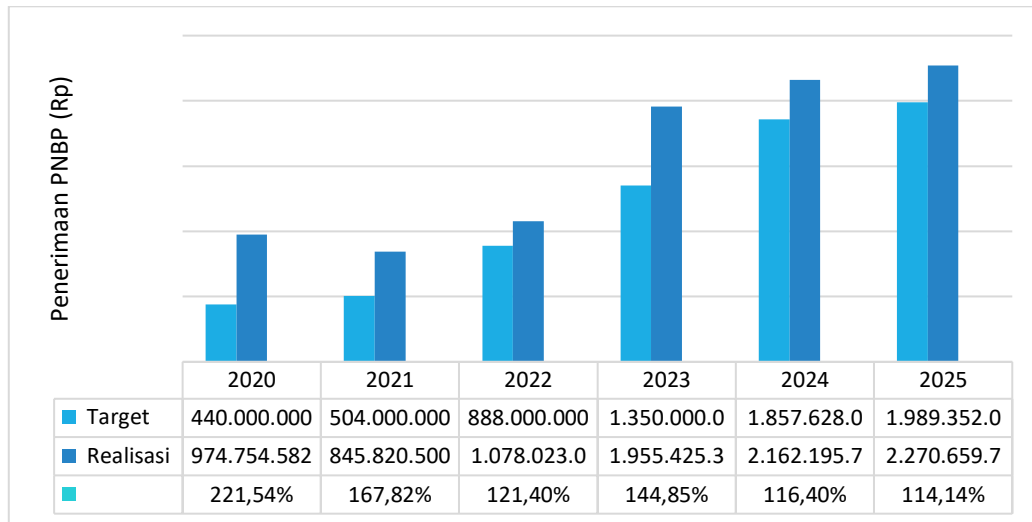
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang bersumber di luar penerimaan perpajakan. Pada Tahun 2025, realisasi PNBP BPMSPH mencapai Rp2.270.659.750,00 atau sebesar 114,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.989.352.000,00. Dari total realisasi tersebut, BPMSPH telah memanfaatkan dana PNBP sebesar Rp1.314.517.302,00 atau 57,89% untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengujian keamanan dan mutu produk hewan.

Tingginya realisasi PNBP tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengujian produk pangan asal hewan serta pemanfaatan fasilitas berupa sewa ruang rapat. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor peternakan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam proses pendaftaran dan registrasi produk hewan turut mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengujian produk. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan fasilitas ruang rapat, yang secara signifikan berkontribusi terhadap kenaikan PNBP.

Grafik 10. Capaian PNBP BPMSPH Tahun 2025



Grafik 11. Capaian PNBPN Tahun 2020 – 2025



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan capaian PNBPN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 mengalami kenaikan. Realisasi PNBPN selalu melebihi target yang diberikan. Kenaikan PNBPN pada tahun 2025, karena adanya peningkatan pengujian hewan dan sewa fasilitas (ruang rapat).

5. Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan laboratorium serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan keamanan pangan asal hewan, BPMSPH secara berkelanjutan melakukan **pengembangan metode pengujian laboratorium yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika regulasi nasional dan internasional..** Sepanjang tahun 2025, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) berhasil mengembangkan dan memvalidasi metode pengujian yang mendukung keamanan dan mutu pangan asal hewan serta pemenuhan regulasi internasional dan kebutuhan pasar sebanyak 5 (lima) metode tercapai 120% dari target 3 (tiga) metode, yaitu:

1. Metode Salmonella Paratyphi A dengan metode qPCR.
2. Metode Logam Fosfor pada pakan hewan (petfood) menggunakan ICP-MS
3. Metode Logam Aluminium (Al) pada Sarang Burung Walet (SBW) menggunakan ICP-MS.
4. Metode Residu antibiotik Bacitracin dengan ELISA
5. Metode Residu antibiotik Lincomycin dengan ELISA

Pengembangan metode deteksi Salmonella Paratyphi A berbasis qPCR merupakan langkah strategis untuk **meningkatkan daya saing komoditas ekspor** melalui pemenuhan standar keamanan pangan internasional yang ketat. Dengan **keunggulan dalam kecepatan dan akurasi deteksi**, metode ini mampu meminimalisir risiko penolakan produk di pasar global (border rejection), mempercepat proses karantina, serta memberikan jaminan kualitas yang memperkuat kepercayaan mitra dagang mancanegara terhadap produk pangan asal Indonesia.

Pengembangan metode analisis Fosfor berbasis ICP-MS merupakan langkah strategis untuk mendukung **kepatuhan produsen** terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait **registrasi pakan hewan (petfood)**. Regulasi ini yang mensyaratkan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal terkait mutu dan keamanan petfood. Dengan akurasi tinggi dari metode ICP-MS, proses verifikasi kandungan nutrisi dan batasan mineral menjadi lebih presisi, sehingga mempercepat proses registrasi, menjamin legalitas edar produk, serta meningkatkan daya saing petfood lokal dalam memenuhi standar keamanan pakan global

Pengembangan metode analisis logam Aluminium (Al) pada Sarang Burung Walet menggunakan ICP-MS diarahkan untuk **meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk ekspor**, khususnya dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan ekspor. Deteksi logam berat hingga level sangat rendah menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pasar internasional dan mencegah penolakan produk di negara mitra dagang.

Pengembangan metode pengujian residu antibiotik Bacitracin dan Lincomycin menggunakan ELISA bertujuan untuk **memperkuat pengawasan residu obat hewan pada produk pangan asal hewan**, mendukung kebijakan pengendalian resistensi antimikroba (AMR), serta menjamin perlindungan konsumen. Metode ELISA dipilih karena memiliki sensitivitas tinggi, waktu analisis relatif singkat, dan efisien untuk pengujian sampel dalam jumlah besar.

6. Peningkatan SDM

Dalam rangka melaksanakan misi RENSTRA dalam meningkatkan kompetensi SDM dalam menjamin mutu hasil pengujian serta menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan SDM serta memenuhi sasaran sistem manajemen mutu, telah dilakukan berbagai jenis peningkatan kompetensi pegawai BPMSPH baik untuk pejabat struktural, fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Arsiparis, Pranata Komputer maupun pelaksana.

Sepanjang tahun 2025 BPMPH telah menyelenggarakan peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai berupa pelatihan/workshop/bimbingan teknis/*inhouse training*. Peningkatan kompetensi tersebut diantaranya BPMPH melakukan fasilitasi *in house training* di bidang laboratorium dan administrasi antara lain:

1. Pelatihan Kesiapan Pegawai : Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Kondisi Darurat
2. Pelatihan Pelayanan Prima
3. Pelatihan Bahasa Isyarat untuk petugas pelayanan informasi publik.
4. Bimtek Pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik
5. *Awareness Training* Sistem Manajemen Integrasi (SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 45001:2018, SNI ISO 9001:2015)
6. Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam Rangka Inspeksi dan Pengujian
7. *In House Training* Isolasi dan Identifikasi *Campylobacter Spp*
8. *In House Training* Bioinformatika AMR
9. *In House Training* Skrining Residu Antibiotika 6 Golongan (*Betalactam, Tetrasiklin, Aminoglikosida, Makrolida, Quinolone dan Sulfonamide*)
10. *In House Training* Ketidakpastian Pengukuran Kualitatif dan Kuantitatif
11. Pelatihan Pelayanan Kesiapan Aksesibilitas dan Layanan Prioritas pada Kelompok Rentan

7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Tugas dan fungsi BPMPH sebagai Unit Pelayanan Teknis di bidang pengujian keamanan produk hewan dan laboratorium rujukan kesmavet nasional bahkan saat ini ditunjuk sebagai laboratorium AMR nasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta, sangat perlu mengimplementasikan sistem manajemen laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017, sistem manajemen lembaga penyelenggara uji profesiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2023 dan sistem manajemen integrasi (SMI) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, akurat, berdaya saing dan dapat dipertanggungjawabkan. BPMPH telah memiliki sertifikat akreditasi dan sertifikasi serta mengimplementasikan:

- 1) Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025: 2017 dari Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup sebanyak 36 jenis pengujian pada 3 bidang pengujian yaitu Kimia, Biologi dan Kimia-Fisika
- 2) Sistem Manajemen Lembaga Penyelenggara Uji Profesiensi berdasarkan SNI ISO 17043: 2023 dari Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup sebanyak 3 jenis pengujian yaitu Formalin, Boraks dan Skrining Residu Antibiotika
- 3) Sistem Manajemen Integrasi (SMI) yang meliputi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan

SNI ISO/IEC 9001: 2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001: 2016 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan SNI ISO 45001: 2018

- 4) Pada tahun 2025, kegiatan implementasi sistem manajemen mutu di BPMSPH adalah melaksanakan resertifikasi untuk sistem manajemen integrasi (SMI) yang meliputi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 9001: 2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001: 2016 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan SNI ISO 45001: 2018.

8. Pembinaan Laboratorium

Dalam rangka memperkuat fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) sebagai penjamin mutu dan keamanan produk hewan secara nasional, BPMSPH melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap laboratorium Kesmavet pusat maupun daerah. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kesesuaian sistem manajemen laboratorium agar selaras dengan standar mutu nasional, khususnya SNI ISO/IEC 17025:2017, sehingga mampu menghasilkan data pengujian yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pembinaan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

- 1) **Identifikasi Laboratorium Kesmavet Pemerintah di Indonesia.**

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh laboratorium Kesmavet pemerintah di Indonesia melalui pengumpulan data terkait kemampuan uji yang dimiliki, jenis parameter pengujian yang dapat dilakukan, serta ruang lingkup akreditasi yang telah diperoleh sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas teknis laboratorium, tingkat kesiapan akreditasi, serta potensi pengembangan pengujian yang dapat ditingkatkan.

- 2) **Penilaian Titik Kritis terhadap Kapasitas Laboratorium.**

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan penilaian titik kritis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi laboratorium dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan produk hewan. Penilaian ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan laboratorium, metode pengujian, sistem manajemen mutu, serta jaminan validitas hasil uji. Untuk mendukung proses ini, disusun sebuah checklist komprehensif yang mampu merangkum seluruh titik kritis laboratorium sebagai instrumen evaluasi yang terstandar.

3) **Evaluasi Titik Kritis Menggunakan Perangkat Penilaian.**

Tahap selanjutnya adalah evaluasi titik kritis melalui penggunaan perangkat penilaian berupa formulir checklist yang telah disusun oleh tim teknis lembaga penjamin mutu laboratorium Kesmavet. Pengisian checklist dilakukan secara sistematis untuk memetakan tingkat pemenuhan standar, mengukur kesenjangan terhadap persyaratan akreditasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, BPMPSH telah melaksanakan pembinaan laboratorium sebanyak 15 laboratorium yang terdiri dari 8 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat (Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner) dan 7 laboratorium Kesmavet UPT Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan rincian pada tabel 24. sebagai berikut:

Tabel 24. Data Pembinaan Laboratorium Tahun 2025

No	Tanggal	Materi	Laboratorium	Provinsi
1	4 - 6 Agustus 2025	Supervisi penilaian titik kritis pengujian kesmavet, penyiapan sampel dan interpretasi hasil uji	Lab UPTD Prov DIY	DIY
2	11-13 Agustus 2025	Supervisi Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet dan Sistem manajemen	BVET Lampung	Lampung
3	12-14 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BVET Medan	Sumatera Utara
4	12-14 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BVET Subang	Jawa Barat
5	18-20 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BVET Banjarbaru	Kalimantan Selatan
6	20-22 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BBVET Maros	Sulawesi Selatan
7	25-27 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Prov Banten	Banten
8	27-29 Agustus 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Prov Aceh	Aceh
9	1-3 September 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BBVET Denpasar	Bali
10	1-3 September 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	BVET Bukittinggi	Sumatera Barat
11	10-12 September 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Prov Jateng	Jawa Tengah
12	10-12 September 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Prov Jabar	Jawa Barat
13	16-17 September 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Prov DKI	DKI
14	20-22 Oktober 2025	Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet	Lab UPTD Malang	Jawa Timur

15	27-29 Oktober 2025	Supervisi Penilaian Titik Kritis Pengujian Kesmavet dan Sistem mutu layanan	Lab UPTD Tuban	Jawa Timur
----	--------------------	---	----------------	------------

9. Uji Profisiensi

Uji profisiensi merupakan salah satu persyaratan implementasi sistem manajemen laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017 yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja laboratorium terhadap pengujian yang dilakukan. uji banding dengan laboratorium lain. BPMSPH telah mengimplementasikan lembaga penyelenggara uji profisiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043: 2023 sehingga wajib menyelenggarakan uji profisiensi setiap tahun. Pada tahun 2025, BPMSPH menyelenggarakan uji profisiensi sebanyak 3 (tiga) ruang lingkup pengujian yaitu Formalin, Boraks dan Skrining Residu Antibiotika yang diikuti oleh 18 (delapan belas) peserta yang berasal dari laboratorium kesmavet baik UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas yang membidangi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada tahun 2025, BPMSPH juga melaksanakan uji coba penyelenggaraan uji profisiensi (PUP) untuk skema uji isolasi dan identifikasi E.coli dan Salmonella Spp serta Antimicrobial Susceptibility Test (AST) untuk kuman E. coli yang diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang berasal dari laboratorium kesmavet baik UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 5 laboratorium swasta. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan persyaratan untuk perluasan ruang lingkup skema uji profisiensi sesuai SNI ISO/IEC 17043: 2023. Selain penyelenggara uji profisiensi, BPMSPH juga mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut dilaksanakan untuk evaluasi kinerja laboratorium terhadap pengujian yang masuk ke dalam ruang lingkup SNI ISO/IEC 17025:2017. Adapun kegiatan Uji Profisiensi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 25. Uji Profisiensi Tahun 2025

No	Parameter Uji	Keikutsertaan	Penyelenggara	Hasil	Ruang Lingkup
1	Skrining Residu Antibiotika	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
2	Boraks	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
3	Formalin	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
4	E.coli	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL

5	Salmonella Spp	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
6	AST	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
7	Deteksi logam berat	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
8	Total Plate Count	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
9	E.coli	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
10	Coliform	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
11	Enterobacteriaceae	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
12	AST	Peserta	EQASIA	PASSED	RL
13	AST	Peserta	VETQAS	PASSED	RL

10. Inovasi

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja, BPMPH membuat inovasi, yaitu:

- **Spesiesure**

Spesiesure memiliki keunggulan inovasi yang signifikan baik dari sisi teknis maupun ekonomis, diantaranya deteksi spesifik hingga tingkat subspecies. Metode ini mampu membedakan antara babi ternak dan celeng berdasarkan perbedaan titik leleh DNA nya. Hal ini sangat penting karena sebagian besar metode PCR sebelumnya hanya mampu mendeteksi keberadaan DNA babi tanpa membedakan subspeciesnya. Selain itu proses pengerjaan cukup singkat sehingga bermanfaat dalam audit makanan atau pengawasan di lapangan terutama pada saat terjadi kasus pemalsuan daging.

Dengan adanya inovasi **Spesiesure** ini, BPMSPH sebagai laboratorium rujukan keamanan dan mutu produk hewan dapat menjamin kualitas pangan segar asal hewan yang beredar di masyarakat.

Spiesesure masuk dalam nominasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025, dan meraih penghargaan Praktik Baik Lingkup Kementerian Pertanian.

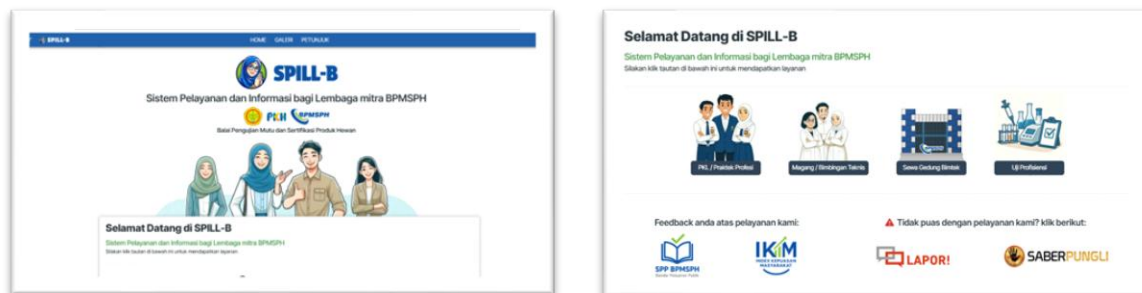
- **Spill B**

BPMPH telah membangun spill B sejak tahun 2024. Pada tahun 2025 Spill B mengalami pengembangan dimana sebelumnya hanya ada 2 menu pelayanan (pelayanan sewa fasilitas dan bimtek/magang), maka pada tahun 2025 Spill B disempurnakan dengan beberapa informasi, diantaranya adalah penambahan menu **Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), SP4N Lapor** dan Layanan Uji Profisiensi serta pemisahan layanan magang untuk dinas dan pelajar/mahasiswa.

Dengan adanya Standar Pelayanan Publik, memberikan informasi prosedur, waktu penyelesaian layanan dan riwayat pemohon. Masyarakat dapat memantau proses layanan secara terbuka.

Spill B, memastikan kepastian & akuntabilitas informasi, kecepatan respon petugas terukur, status permohonan terdokumentasi otomatis, tidak ada informasi yang “hilang” atau tidak tercatat. Hal ini menjadikan SPILL-B sebagai media informasi yang akuntabel, bukan sekadar alat administrasi.

Spill B menyediakan umpan balik dan informasi dua arah. Spill B dilengkapi kanal pengaduan dan SKM. Sehingga pengguna layanan tidak hanya menerima informasi tetapi juga menyampaikan penilaian, memberikan masukan untuk perbaikan layanan. Hal ini berarti menempatkan SPILL-B sebagai platform komunikasi informasi dua arah.



Gambar 4. Screen Shot Spill B

- **Pelayanan Inklusif**

BPMSPH turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan inklusi dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses layanan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi.

Sepanjang tahun 2025, BPMSPH telah mengembangkan **inovasi pelayanan inklusi**, yakni:

- a) **Ruang Tenang.**

BPMSPH menyediakan **ruang tenang** yang dirancang sebagai area khusus yang aman, nyaman dan minim distraksi untuk digunakan penyandang disabilitas sensorik, *neurodiversitas*, serta individu yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ruang Tenang menyediakan fasilitas yang mendukung kenyamanan psikologis, seperti pencahayaan lembut, suasana hening, tata ruang

sederhana. inovasi Ruang Tenang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan.



Gambar 5. Ruang Tenang

b) **Pelibatan penyandang disabilitas**

Inovasi ini menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kapasitas dan kontribusi nyata.

Dalam penyusunan kebijakan, penyandang disabilitas dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi. Pelibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan, hambatan, dan potensi penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang ditetapkan lebih inklusif, implementatif, dan berkeadilan



Gambar 6. Perwakilan Disabilitas pada FKP



Gambar 7. Diskusi Pelayanan Inklusif dengan Yayasan Disabilitas Action Indonesia

c) **Bazar inklusif**

Penyelenggaraan bazar inklusif memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai pelaku usaha, pengisi kegiatan, maupun pengunjung. Kegiatan ini menjadi sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas.



Gambar 8. Bazar Inklusif

11. Penghargaan yang Diterima

Selama tahun 2025, BPMP SH telah menerima pengakuan dan penghargaan sebagai berikut:

- **Peringkat ke 1** sebagai **unit kerja informatif** dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup kementerian pertanian kategori Eselon III. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat. keterbukaan informasi publik berkaitan erat dalam hal akuntabilitas kinerja yakni untuk menyampaikan hasil kerja kinerja BPMP SH kepada masyarakat.



Gambar 9. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

- Unit Kerja Pelayanan Publik Kategori **Pelayanan Prima** Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Penghargaan Pelayanan Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian penghargaan ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam menerapkan standar pelayanan, inovasi berkelanjutan, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Gambar 10. Penghargaan Pelayanan Prima Tahun 2025

- Penghargaan **Praktik Baik Inovasi** sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Inovasi Spesies Sure. Penghargaan Praktik Baik Inovasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan unit kerja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata, berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan, serta mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Capaian penghargaan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendorong budaya inovasi

berkelanjutan, penguatan tata kelola pelayanan, serta percepatan transformasi layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.



Gambar 11. Penghargaan Praktik Baik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas pengelolaan keuangan, transparansi pengungkapan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan laporan keuangan serta penerapan peraturan yang berlaku dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana oleh instansi pemerintah. Melalui akuntabilitas ini, pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga masyarakat dapat menilai tingkat efektivitas kinerja pemerintah.

Tahun 2025, BPMSPH Bogor memperoleh pagu awal senilai Rp. 17.071.847.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan: 1) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2) Penyidikan dan Pengujian Produk dan 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat perubahan pagu anggaran, sebagai berikut:

Tabel 26, Revisi Anggaran BPMSPH Tahun 2025

No	Tanggal	Jenis Revisi	Revisi Ke	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	No Surat Pengesahan	Keterangan
1	02 Desember 2024	-	-	17.071.847.000	-		Dipa Awal
2	24 Januari 2025	Rev DJA	DIPA 1	17.071.847.000	17.071.847.000	S-30/AG/AG.3/2025	Gugur Bintang Perjalanan dan Efisiensi Perjalanan
3	20 Februari 2025	Rev DJA	DIPA 2	17.071.847.000	17.071.847.000	S-63/AG/AG.3/2025	Penghematan Efisiensi
4	24 Februari 2025	Rev DJPB	DIPA 3	17.071.847.000	17.071.847.000	S-651/WPB.13/2025	Rev Penyesuaian Hal III dan Pemutakhiran POK
5	09 Maret 2025	Rev DJA	DIPA 4	17.071.847.000	17.313.247.000	S-258/AG/AG.3/2025	Gugur Bintang dan penambahan Pagu
6	26 Maret 2025	Rev DJA	DIPA 5	17.313.247.000	17.313.247.000	S-320/AG/AG.3/2025	Pengembalian Pagu Penghematan Efisiensi (PE) Non Perjadi
7	17 April 2025	Rev DJPB	DIPA 6	17.313.247.000	17.313.247.000	S-1170/WPB.13/2025	Pergeseran Akun dan Penyesuaian Hal III DIPA
8	06 Mei 2025	Rev DJA	DIPA 7	17.313.247.000	21.509.047.000	S-434/AG/AG.3/2025	Tambahan Pagu Kegiatan Bantuan Ternak Ayam Merah Putih
9	03 Juni 2025	Rev DJPB	DIPA 8	21.509.047.000	21.509.047.000	S-1991/WPB.13/2025	Pergeseran Akun dan Penyesuaian Hal III DIPA
10	20 Juni 2025	Rev DJA	DIPA 9	21.509.047.000	21.717.347.000	S-542/AG/AG.3/2025	Penambahan Pagu Belanja Bahan dan Pembukaan sebagian akun perjalanan dinas
11	14 Juli 2025	Rev DJPB	DIPA 10	21.717.347.000	21.717.347.000	S-2940/WPB.13/2025	Pergeseran Akun Anggaran dan Penyesuaian Hal III DIPA
12	26 Agustus 2025	Rev DJPB	DIPA 11	21.717.347.000	21.717.347.000	S-3404/WPB.13/2025	Pergeseran Akun Anggaran dan Penyesuaian Hal III DIPA
13	18 September 2025	Rev DJA	DIPA 12	21.717.347.000	22.363.826.000	S-791/AG/AG.3/2025	Tambahan Pagu Belanja Gaji PNS dan PPPK
14	01 Oktober 2025	Rev DJA	DIPA 13	22.363.826.000	24.655.826.000	S-820/AG/AG.3/2025	Tambahan Pagu Belanja Modal
15	07 Oktober 2025	Rev DJPB	DIPA 14	24.655.826.000	24.655.826.000	S-3940/WPB.13/2025	Pergeseran Akun Anggaran dan Penyesuaian Hal III DIPA
16	21 Oktober 2025	Rev DJPB	DIPA 15	24.655.826.000	24.655.826.000	S-4722/WPB.13/2025	Pergeseran Akun Anggaran dan Penyesuaian Hal III DIPA
17	24 Oktober 2025	Rev KPA	KPA 1	24.655.826.000	24.655.826.000		Pergeseran Kegiatan 526 ke 521
18	06 Nopember 2025	Rev DJA	DIPA 17	24.655.826.000	24.925.826.000	S-950/AG/AG.3/2025	Tambahan belanja Pemeliharaan PM dan Gaji
19	10 Nopember 2025	Rev KPA	KPA 2	24.925.826.000	24.925.826.000		Pergeseran Item Akun Kegiatan
20	12 Nopember 2025	Rev DJPB	DIPA 18	24.925.826.000	25.253.705.000	S-5022/WPB.13/2025	Pemanfaatan Kelebihan Target PNPB dan pergeseran akun PNPB dari 52 ke 53
21	20 Nopember 2025	Rev KPA	KPA 3	25.253.705.000	25.253.705.000		Pergeseran Item Akun Kegiatan
22	05 Desember 2025	Rev KPA	KL DIPA 19	25.253.705.000	25.253.705.000		Pergeseran Akun Anggaran, Penyesuaian Hal III DIPA dan Pergeseran akun 52 ke 51 Penyelesaian Gaji Minus
23	11 Desember 2025	Rev KPA	DIPA 20 KPA 4	25.253.705.000	25.253.705.000		Pergeseran Item Akun Kegiatan, Penyesuaian Hal III DIPA (Pemutakhiran Revisi POK)

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun 2025, pagu BPMSPH sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 25.253.705.000 atau naik 47,93% dari pagu awal dengan jumlah pagu blokir sebesar Rp40.007.000,-.

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

Kode	Uraian	Pagu Akhir	Pagu Blokir	Realisasi		Sisa Pagu	
				Anggaran	%	Anggaran	%
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	4.195.800.000	-	3.941.154.954	93,93%	254.645.046	6,07%
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.575.146.000	-	9.314.289.922	97,28%	260.856.078	2,72%
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	11.482.759.000	40.007.000	11.159.601.973	97,53%	283.150.027	2,47%
	JUMLAH	25.253.705.000	40.007.000	24.415.046.849	96,83%	798.651.151	3,17%

Sumber : OMSPAN 2025

Pada tahun 2025, penyerapan anggaran BPMSPH sebesar Rp24.375.039.849,- atau setara dengan 96,83% terhadap total pagu anggaran akhir dikurangi blokir sebesar Rp25.213.698.000,-. Jika tanpa memperhitungkan blokir anggaran, pagu anggaran sebelum blokir sebesar Rp25.253.705.000,- sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 96,68%. Berdasarkan Tabel 21 dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 3 (tiga) kegiatan, proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, karena kegiatan tersebut mencakup kegiatan belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan minimal UPT.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Akun	Alokasi Anggaran	pagu blokir	Realisasi Angga	Persentase
51. Belanja Pegawai	5.056.585.000		5.025.523.925	99,39%
52. Belanja Barang	17.051.244.000	40.007.000	16.254.795.195	95,55%
53. Belanja Modal	3.145.876.000		3.134.727.729	99,65%
JUMLAH	25.253.705.000	40.007.000	24.415.046.849	96,83%

Sumber: OMSPAN BPMSPH 2025

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu (i) Belanja Pegawai sebesar Rp5.,026 miliar,- atau 99,39% dari pagu anggaran Rp5,056 miliar; (ii) Belanja Barang sebesar Rp16,255 miliar atau 95,55% dari pagu anggaran Rp17,011 miliar (setelah dikurangi blokir); dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp3,134 miliar atau 99,65% dari pagu Rp3,145 miliar.

Pelaksanaan kinerja BPMPHS Bogor tahun 2025 secara umum telah dapat diselesaikan tepat waktu dengan persentase realisasi anggaran 96,83% dan nilai kinerja anggaran sebesar 93,21.

Hambatan yang dijumpai antara lain:

1) Aspek Administrasi dan Manajemen

Adanya pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment, refocusing*, dan blokir lainnya) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Selain itu, terdapat permasalahan kontrak yang didaftarkan di INAPROC yang tidak terintegrasi di SAKTI Kemenkeu. Hal ini berakibat kepada terbatasnya kontrol terhadap kontrak tersebut. Hal lainnya adalah penumpukan pelaksanaan pekerjaan di akhir tahun sehingga potensi risiko *human error* semakin tinggi terutama dalam hal mencermati pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT);

2) Aspek Teknis

Dari aspek teknis untuk kegiatan pengujian keamanan mutu produk hewan terkendala dengan adanya pengadaan bahan uji yang inden (terkendala ijin impor) sehingga pengadaan mengalami keterlambatan dan hambatan dalam pelaksanaan pembayaran.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana disebut di atas, telah ditempuh berbagai upaya antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sesama petugas terkait pengelola anggaran dan keuangan BPMSPH;
- 2) Melaksanakan Pertemuan evaluasi dan koordinasi secara intensif dengan tim pengelola anggaran;
- 3) Berkoordinasi dan berkonsultasi intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran, KPPN Bogor dan Ditjen PKH.
- 4) Perencanaan kegiatan dan anggaran lebih ditingkatkan dan dilaksanakan di awal tahun agar dapat terdeteksi secara dini hambatan dan permasalahan yang terjadi
- 5) *Refreshment* berkala pengelola keuangan.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran kegiatan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) tahun 2025 berpedoman pada hasil perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Efisiensi BPMSPH sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diukur dengan menghitung secara agregat variabel Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), baik Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) pada Rincian Output (RO) dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan Efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Ditjen PKH. Pengukuran Nilai Efisiensi (Nama UPT) dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem informasi Aplikasi Monev Kemenkeu sebagai sumber data Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK untuk menghitung Nilai Efisiensi Satuan Kerja. Berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu, nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK sebagaimana tersaji pada Lampiran 10 (lampirkan hasil download dari SMART tabel Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK) sehingga dapat diperoleh Nilai Efisiensi BPMSPH T.A. 2025 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 80) + (60\% \times 123,24\%) \\ &= 32\% + 73,94\% \\ &= \mathbf{105,94\%} \end{aligned}$$

E. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2024

Pada tahun 2024 telah disampaikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja tahun 2025 yaitu:

- 1) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk sinergitas dan optimalisasi kegiatan pelayanan prima dan penganggaran untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian target fisik dan anggaran
- 2) Terus berupaya untuk membangun kolaborasi/kerjasama untuk meningkatkan kinerja pelayanan di BPMSPH
- 3) Melakukan pengukuran indikator capaian/monitoring perjanjian kinerja untuk dijadikan dasar pemberian reward dan punishment organisasi;
- 4) Terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis maupun administrasi agar dapat mengimplemnetasikan pelayanan prima serta melakukan monev berkala terhadap kecapakan petugas layanan;

Dari rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja di tahun 2025, yaitu dengan:

- 1) BPMP SH telah mengembangkan aplikasi Spill B, untuk optimalisasi pelayanan, yakni dengan menambahkan fitur pelayanan uji profisiensi, penambahan menu Standar Pelayanan Prima, Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan, sehingga pengguna layanan dapat melihat Riwayat perohonan, dapat memberikan umpan balik hasil pelayanan serta dapat menyampaikan pengaduan, apabila pelayanan tidak sesuai standar. Dari sisi petugas, petugas dapat memantau progress pelaksanaan pembayaran oleh pengguna layanan. Perkembangan Sistem Informasi Spill B (Semula menjadi) tersaji pada lampiran 11.
- 2) Sepanjang tahun 2025, BPMP SH telah berkolaborasi guna meningkatkan pelayanan publik antara lain:
 - Yayasan Disabilitas Action Indonesia dalam memberikan pelayanan public inklusif
 - Kolaborasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain dengan:
 - Sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor
 - Universitas Medika Suherman
 - Kolaborasi Peningkatan Kapasitas SDM dengan
 - UTRECHT UNIVERSITY
 - Kolaborasi di bidang Pengujian laboratorium
 - Laboratorium UPTD Keswan Malang
 - TÜV Rheinland (badan usaha sertifikasi produk)
 - Lembaga Penjamin Halal (LPH) Arsy
 - Lembaga Penjamin Halal (LPH) Y AIS
 - Lembaga Penjamin Halal (LPH) Al Mujahidin
- 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan berkala setiap 3 bulan sekali dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. (lampiran 12)
- 4) BPMP SH telah melaksanakan peningkatan kompetensi SDM melalui in house training, workshop dan coaching.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dengan keberhasilan dengan total realisasi anggaran sebesar **96,83%** dan rata-rata capaian fisik sebesar **104,83%** dengan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai IKM sebesar 3,69. Hal ini telah memenuhi capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.60 (102,50%), **sangat berhasil;**
2. Nilai pembangunan Zona Integritas BPMPH sebesar 92,73 dari target kinerja 80 (115,91%), sangat berhasil.
3. Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMPH sebesar 96,06% dari target 98% (98%), **berhasil;**
4. Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMPH sebesar 100% dari target 98% (102%), **sangat berhasil;**
5. Kinerja RO tercapai:
 - Bantuan ternak unggas tercapai 12.600 ekor dari target 12.600 ekor (100%), **berhasil**
 - Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan tercapai 16.505 produk (120%), **sangat berhasil**
 - Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner tercapai 4 unit dari target 3 unit (133%), **sangat berhasil**
 - layanan BMN 4 layanan (100%), **berhasil;**
 - layanan umum 1 layanan (100%), **berhasil;**
 - layanan perkantoran 2 layanan (100%), **berhasil;**
 - layanan manajemen SDM 62 layanan (100%), **berhasil;**
 - layanan pemantauan dan evaluasi 1 dokumen (100%), **berhasil;**
 - layanan manajemen keuangan 12 dokumen (100%), **berhasil;**
6. Realisasi serapan anggaran tahun 2025 adalah Rp 24.415.046.849,- (96,83%) dari Pagu anggaran sebesar Rp 25,253.705.000, dengan pagu blokir sebesar Rp 40.007.000,-, **berhasil.**

B. Rekomendasi

Menindaklanjuti hasil evaluasi diatas, dari pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk lebih optimalnya pelaksanaan kinerja anggaran dan kegiatan, antara lain:

- 1) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi digital untuk sinergitas dan optimalisasi kegiatan pelayanan prima dan penganggaran untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian target fisik dan anggaran
- 2) Perbaikan pengelolaan barang persediaan melalui penyempurnaan prosedur, penguatan pengendalian internal, serta pengembangan inovasi dalam sistem pencatatan dan pemantauan persediaan.
- 3) Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung layanan pengujian secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan pemeliharaan, penjadwalan rutin, serta pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas. Ketersediaan sarana prasarana yang terpelihara dengan baik berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kualitas layanan, kelancaran proses kerja, serta pencapaian target kinerja secara konsisten.
- 4) Terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis maupun administratif agar dapat mengimplemnetasikan pelayanan prima serta melakukan monev berkala terhadap kompetensi petugas layanan.
- 5) Penguatan budaya kerja dan integritas perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui internalisasi nilai-nilai organisasi, keteladanan pimpinan, serta peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan standar operasional prosedur. Upaya ini diharapkan dapat mendorong konsistensi perilaku pegawai, meminimalkan risiko penyimpangan, serta mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 6) Terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait keamanan dan mutu produk hewan. Sinergi lintas sektor memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan, pengujian, serta penjaminan mutu produk hewan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lampiran 1. Revisi PK

Revisi PK

No	Tgl	PK Awal			PK Revisi			Keterangan
		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	
1	Desember 2024	3 Sasaran Kinerja	9 Indikator Kinerja	17.071.847.000				PK awal
2	18 Maret 2025	3 Sasaran Kinerja	9 Indikator Kinerja	17.071.847.000	3 Sasaran Kinerja	9 Indikator Kinerja	17.313.247.000	PK Revisi 1 - Perubahan Pagu Anggaran dan Perubahan Target Kinerja hasil uji kemandirian produk hewan semula 11.000 produk menjadi 11.404 produk
3	08 Mei 2026	3 Sasaran Kinerja	9 Indikator Kinerja	17.313.247.000	4 Sasaran Kinerja	10 Indikator Kinerja	21.509.047.000	Revisi PK 2- Perubahan Pagu Anggaran, penambahan sasaran kegiatan (penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak) dan Indikator Kinerja (bantuan ternak unggas)
4	30 Juni 2026	4 Sasaran Kinerja	10 Indikator Kinerja	21.509.047.000	4 Sasaran Kinerja	10 Indikator Kinerja	21.717.347.000	Revisi PK 3- Perubahan Pagu Anggaran dan Perubahan Target Kinerja hasil uji kemandirian produk hewan semula 11.404 produk menjadi 11.750 produk
5	05 November 2026	4 Sasaran Kinerja	10 Indikator Kinerja	21.717.347.000	4 Sasaran Kinerja	11 Indikator Kinerja	24.655.826.000	Revisi PK 4- Perubahan Pagu Anggaran dan Penambahan Target Kinerja (sarana kesehatan masyarakat veteriner) pada sasaran kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
6	08 Desember 2026	4 Sasaran Kinerja	11 Indikator Kinerja	24.655.826.000	4 Sasaran Kinerja	11 Indikator Kinerja	25.253.705.000	Revisi PK 5- Perubahan Pagu Anggaran pemanfaatan PNBP
7	31 Desember 2026	4 Sasaran Kinerja	11 Indikator Kinerja	25.253.705.000	3 Sasaran Kinerja	4 Indikator Kinerja	25.253.705.000	Revisi PK 6- Revisi Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja, menyesuaikan dengan renstra Ditjen PKH

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2025

1. Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180JKS, JAKARTA12011
Telp. (021) 7815586 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785561 - 83, 78547319 E-mail : djlennak@pertanian.go.id
Website : http://ditjenpnh.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

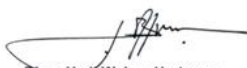
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2024
Kepala Balai,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Agung Suganda ↓


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi
Rp. 17.071.847.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.000 Produk
3	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	6.505.567.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	10.556.280.000,-
Jumlah	Rp	17.071.847.000,-
Terbilang : (Tujuh Belas Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

2. Perjanjian Kinerja Revisi I 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1190/UKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 7847319 E-mail : ditjenak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenkph.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
(BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 18 Maret 2025

Kepala Balai,

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
(BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2025

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Pihak Pertama,

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp. 17.313.247.000,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran;
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

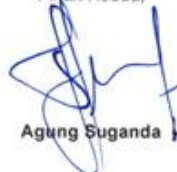
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.404 Produk
3	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 6.746.967.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 10.556.280.000,-
Jumlah	Rp 17.313.247.000,-
Terbilang : (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	

Jakarta, 18 Maret 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

3. Perjanjian Kinerja Revisi II 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78847319 E-mail : ditjenan@pertanian.go.id
Website : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Mei 2025

Kepala Balai,

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Mei 2025

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Pihak Pertama,

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi
Rp. 21.509.047.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600 ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.404 Produk
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 6.746.967.000,-
2. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 4.195.800.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 10.566.280.000,-
Jumlah	Rp 21.509.047.000,-
Terbilang : (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	

Jakarta, 08 Mei 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

4. Perjanjian Kinerja Revisi III 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78847319 E-mail : djljennak@pertanian.go.id
Website : http://djljengkh.pertanian.go.id

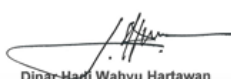
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Juni 2025
Kepala Balai,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Pihak Pertama,

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi
**Rp. 21.717.347.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas
Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%);
III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%);
IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600 ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750 Produk
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

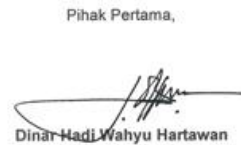
III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	6.955.267.000,-
2. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp	4.195.800.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	10.566.280.000,-
Jumlah	Rp	21.717.347.000,-
Terbilang : (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua,

Agung Suganda

Pihak Pertama,

Dinar Nadi Wahyu Hartawan

5. Perjanjian Kinerja Revisi IV 2025


KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78647319 E-mail : ditjenpak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpak.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

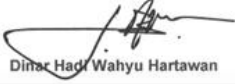
Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 05 November 2025

Kepala Balai,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 05 November 2025

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Pihak Kedua,


Agung Suganda

**KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp. 24.655.826.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran;
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600 ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750 Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 unit
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

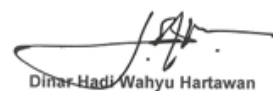
Kegiatan	Anggaran	
1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	9.247.267.000,-
2. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp	4.195.800.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	11.180.505.000,-
Jumlah	Rp	24.655.826.000,-
Terbilang : (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)		

Jakarta, 05 November 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

6. Perjanjian Kinerja Revisi V 2025

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78647319 E-mail : ditjenpak@pertanian.go.id
Website : http://ditjenpkh.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Desember 2025

Kepala Balai,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu Hartawan
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 Desember 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. 25.253.705.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai
2	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600 ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750 Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	3 unit
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manaj		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran
1.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.575.146.000,-
2.	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 4.195.800.000,-
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 11.482.759.000,-
Jumlah		Rp 25.253.705.000,-
Terbilang : (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)		

Jakarta, 08 Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agung Suganda

Dinar Hadi Wahyu Hartawan

7. Perjanjian Kinerja Revisi VI 2025

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/UKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 Faksimile (021) 785581 - 83, 78847319 E-mail : ditjenhik@pertanian.go.id
Website : http://ditjenhik.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2025

Kepala Balai,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinar Hadi Wahyu
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

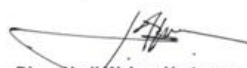
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp. 25.253.705.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): 102.000.000,-

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,60	Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	Nilai
2	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	98	%
3	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	98	%

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan		Anggaran	
1.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	9.575.146.000,-
2.	Penyediaan Bibit dan Benih serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp	4.195.800.000,-
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp	11.482.759.000,-
Jumlah		Rp	25.253.705.000,-

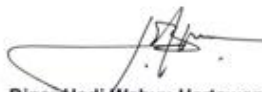
Terbilang : (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,


Agung Suganda

Pihak Pertama,


Dinar Hadi Wahyu Hartawan

Lampiran 3. *Cascading* Sasaran Strategis Kementerian Pertanian, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BPMSPH Serta Indikator Kinerja BPMSPH 2025

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator kinerja	Satuan	Baseline	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN PERTANIAN								
SS2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan							
IKSS2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	%	indikator baru	66	68	68	70	72
SS.7	Terwujudnya Reformasi birokrasi kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi							
IKSS7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	85	87	88	90	91	91
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SP6	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel							
IKP 2.1	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	Indeks	indikator baru	0,89	0,89	0,89	0.90	0.90
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan							
IKSP 3	Indeks Mutu komoditas peternakan	Indeks		0.49	0,51	0,53	0,55	0,57
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan							
IKSP 4	Indeks kemandirian komoditas peternakan	Indeks		0,61	0,63	0,66	0,68	0,69
SP 4	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel							
IKSP 9	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH	Indeks	indikator baru	0,885	0,887	0,891	0,895	0,899
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan								
SK1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal							
IKK1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH	%	94	94	94	94	94	95
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBD Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	63	11	7	7	7	7
IKK1.2	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH	%	85	85	86	86	87	87
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBD Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	63	0	8	8	8	8
SK2	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian							
IKK2.1	Nilai Indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) Ditjen PKH	Nilai	90,67	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator kinerja	Satuan	Baseline	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
RO	EBD Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	239	1	1	1	1	1
RO	EBD 952 Layanan Perencanaan danpanganggaran	Layanan	396	13	0	0	0	0
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBA 956 Layanan BMN	Layanan	131	240	0	0	0	0
SK3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di Lingkup Kementerian Pertanian							
IKK3.24	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH	Skala Likert	3,626	3,626	3,631	3,636	3,641	3,646
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA 960 Layanan Organisasi dan tata kelola internal	Layanan	23	1	0	0	0	0
RO	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	47	45	1	1	1	1
SK4	Meningkatnya kepuasan unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen sekretariat Ditjen PKH							
IKK4.1	Tingkat Kepuasan Unit Esselon II terhadap layanan dukungan manajemen sekretaris Ditjen PKH	Skala Likert	3.28	3.28	3.3	3.35	3.4	3.45
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	2	28	1	1	1	1
KRO	EBB Layanan Sarana Prasarana Internal							
RO	EBB Layanan Sarana Internal	Unit	14	1	3	6	6	6
KRO	EBC Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal							
RO	EBC 954 Layanan Manajemen SDM	orang	RO baru	0	125	3.040	3.133	3.236
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak								
SK1	Terpenuhinya Potensi Produksi Ternak untuk Produksi Daging, Telur dan Susu							
IKK1.2	Persentase Pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur	%		102,10	102,14	102,18	102,22	102,26
KRO	QEO Bantuan Produk dan Peralatan							
RO	QEO 004 Ternak Unggas	Ekor	RO Baru	75.000	92.500	200.000	350.000	400.000
1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
SK2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap Zoonosis, Keamanan dan Kesehatan Produk Hewan							
IKK2.1	Indek Keamanan dan Kesehatan Produk Hewan	Indeks	0,51	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
RO	RAG 001 Sarana Kesehatan Masyaraakt Veteriner	Unit		13	0	10	10	10

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator kinerja	Satuan	Baseline	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan							
IKK3.1	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
KRO	QJA Penyidikan dan pengujian produk							
RO	QJA 001 Layanan pengujian dan keamanan produk	Produk	2.921	37.925	12.796	72.802	79.890	87.720
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan								
SK5	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu							
IKK5.2	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							
RO	QIC 002 Pengujian Penerapan Jaminan Mutu pada unit usaha produk peternakan	Lembaga	RO Baru	0	4	6	8	10
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN								
SK 1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
IKSK1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	Skala Likert	3,60	3,60	3,60	3,626	3,631	3,641
IKSK1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	Nilai		80	85	85	85	86
SK 2	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan							
IKSK 2	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
SK 3	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu							
IKSK 3	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan								
SK1	Ditindaklanjutnya hasil temuan pengawas internal dan eksternal							
IKSK1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPMSPH	%	94	94	94	94	94	95
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1
SK2	Meningkatnya kualitas Layanan Manajemen Internal							
IKSK2.1	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPMSPH	Nilai	90,70	90,70	90,75	90,80	90,85	90,90
KRO	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen		12	1	1	1	1

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator kinerja	Satuan	Baseline	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
KRO	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal							
RO	EBA 956 Layanan BMN	Layanan		4	1	1	1	1
RO	EBA 962 Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1
KRO	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal							
RO	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan		2	0	0	0	0
KRO	EBC Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal							
RO	EBC 954 Layanan Manajemen SDM	orang	RO baru	62				
1785 Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak								
SK1	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi							
KRO	QEO Bantuan Produk dan Peralatan							
RO	QEO 004 Ternak Unggas	Ekor	RO Baru	12.600				
1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
SK3	Terpenuhinya Permintaan Pengujian Keamanan Produk Hewan							
IKK3.1	Persentase Pengujian Keamanan Produk Hewan yang dilakukan Tepat Waktu Terhadap Total Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
KRO	QJA Penyidikan dan pengujian produk							
RO	QJA 001 Layanan pengujian dan keamanan produk	Produk	18.193	16.505	12.200			
KRO	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
RO	RAG 001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit		3	0	0	0	0
5891 Hilirisasi Hasil Peternakan								
SK5	Terwujudnya Komoditas Produk Peternakan Bermutu							
IKK5.2	Persentase Pengujian Mutu Produk Peternakan yang dilakukan Terhadap Permintaan Pengujian di BPMSPH	%		98	98	98	98	98
KRO	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga							

Lampiran 4. Tata Cara Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPMPSH adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan BPMSPH berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
- Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada pengguna layanan setelah memperoleh pelayanan dari BPMSPH
- Pengolahan data dalam survei menggunakan skala linkert dimana setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai perunsur X = Jumlah unsur

- Nilai SKM diperoleh dengan rumus:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{jumlah unsur} \times \text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

- Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM hasil penilain} \times 25$$

- Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayana n	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Lampiran 5. HasilSurvei Pengukuran IKM Tahun 2025

No	Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Responden no 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Responden no 2	4	4	3	3	4	4	4	4	4
3	Responden no 3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	Responden no 4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
5	Responden no 5	3	4	3	3	4	3	4	4	4
6	Responden no 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Responden no 7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Responden no 8	3	4	4	3	3	4	3	4	4
9	Responden no 9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Responden no 10	4	4	3	3	4	4	4	4	4
11	Responden no 11	4	4	3	3	4	4	4	4	4
12	Responden no 12	4	4	3	3	4	4	4	4	4
13	Responden no 13	4	3	4	3	3	3	3	3	3
14	Responden no 14	4	4	4	3	3	3	3	4	4
15	Responden no 15	3	4	3	4	3	3	3	3	4
16	Responden no 16	4	4	4	4	3	4	4	4	4
17	Responden no 17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Responden no 18	4	4	3	3	3	4	4	4	4
19	Responden no 19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Responden no 20	4	3	3	3	3	3	3	3	4
21	Responden no 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Responden no 22	3	3	3	3	4	3	4	3	3
23	Responden no 23	4	4	3	3	4	4	4	4	4
24	Responden no 24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Responden no 25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Responden no 26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	Responden no 27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	Responden no 28	4	4	3	4	4	4	4	4	4
29	Responden no 29	4	4	3	3	4	3	4	4	3
30	Responden no 30	3	3	2	3	3	3	3	3	3
31	Responden no 31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	Responden no 32	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Responden no 33	4	4	3	3	4	4	4	4	4
34	Responden no 34	4	4	3	3	4	4	4	4	4
35	Responden no 35	4	3	3	3	3	4	4	4	3
36	Responden no 36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Responden no 37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Responden no 38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	Responden no 39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Responden no 40	3	3	3	4	3	3	3	3	3
41	Responden no 41	3	3	3	3	4	4	4	4	4
42	Responden no 42	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
43	Responden no 43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Responden no 44	3	3	4	3	3	4	4	3	4
45	Responden no 45	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Responden no 46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	Responden no 47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	Responden no 48	4	4	3	4	4	4	4	4	3
49	Responden no 49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Responden no 50	4	4	3	3	3	4	4	3	4
51	Responden no 51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	Responden no 52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	Responden no 53	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	Responden no 54	4	4	4	3	4	4	4	4	4
55	Responden no 55	4	4	3	3	3	3	4	4	3
56	Responden no 56	4	4	3	3	3	4	4	4	4
57	Responden no 57	4	4	3	3	4	4	4	4	4
58	Responden no 58	4	4	3	3	4	4	4	4	4
59	Responden no 59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	Responden no 60	4	3	3	3	4	4	3	3	4
61	Responden no 61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	Responden no 62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	Responden no 63	3	2	3	3	3	3	3	3	3
64	Responden no 64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	Responden no 65	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	Responden no 66	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	Responden no 67	3	3	2	3	3	3	3	3	3
68	Responden no 68	4	4	3	3	3	4	4	4	4
69	Responden no 69	4	4	3	4	4	4	4	4	4
70	Responden no 70	4	4	3	4	4	4	4	4	4
71	Responden no 71	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	Responden no 72	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Responden no 73	3	3	3	3	4	4	4	4	3
74	Responden no 74	4	4	4	3	4	4	4	4	4
75	Responden no 75	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	Responden no 76	3	3	3	3	3	3	4	3	3
77	Responden no 77	4	4	4	3	4	4	4	4	4
78	Responden no 78	4	4	4	3	4	4	4	4	4
79	Responden no 79	3	4	4	3	3	4	4	3	3
80	Responden no 80	3	4	3	3	4	4	4	4	4
81	Responden no 81	4	4	3	3	4	4	4	4	4
82	Responden no 82	3	4	3	3	4	4	4	3	4
83	Responden no 83	4	4	3	3	4	4	4	4	3
84	Responden no 84	4	4	3	4	4	4	4	4	4

No	Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
85	Responden no 85	3	4	3	3	3	4	4	4	4
86	Responden no 86	4	4	3	4	4	4	4	4	4
87	Responden no 87	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	Responden no 88	4	3	3	3	3	3	3	3	3
89	Responden no 89	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	Responden no 90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	Responden no 91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	Responden no 92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Responden no 93	3	4	4	4	4	4	3	3	4
127	Responden no 127	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	Responden no 128	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	Responden no 129	4	4	4	4	3	4	4	4	4
130	Responden no 130	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	Responden no 131	3	3	3	3	3	3	3	3	4
132	Responden no 132	3	4	3	3	3	4	4	4	4
133	Responden no 133	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	Responden no 134	4	4	3	4	4	4	4	4	4
135	Responden no 135	3	4	3	3	3	4	4	3	3
136	Responden no 136	3	3	3	3	3	4	4	3	3
137	Responden no 137	4	4	4	4	4	4	4	4	3
138	Responden no 138	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	Responden no 139	4	4	4	4	4	4	4	3	4
140	Responden no 140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	Responden no 141	4	3	4	4	4	4	4	4	4
142	Responden no 142	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	Responden no 143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	Responden no 144	3	4	3	4	4	4	4	4	4
145	Responden no 145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	Responden no 146	3	3	2	3	3	3	3	2	3
147	Responden no 147	3	3	3	3	3	3	3	3	3
148	Responden no 148	4	4	4	3	4	4	4	3	3
149	Responden no 149	4	4	4	4	4	4	4	4	4
150	Responden no 150	4	4	4	3	4	4	4	4	4
151	Responden no 151	4	4	3	3	3	3	3	3	4
152	Responden no 152	4	4	4	4	4	4	4	4	4
153	Responden no 153	3	4	3	3	3	3	3	3	3
154	Responden no 154	4	3	3	4	4	4	4	4	4
155	Responden no 155	4	3	3	4	4	4	4	4	4
156	Responden no 156	4	4	4	4	4	4	4	4	4
157	Responden no 157	3	3	3	3	3	4	4	4	4
158	Responden no 158	4	3	3	3	4	3	3	4	4
159	Responden no 159	4	4	3	4	4	4	4	4	4

No	Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
160	Responden no 160	4	4	4	4	4	3	4	3	3
161	Responden no 161	4	4	4	4	4	3	4	3	2
162	Responden no 162	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	Responden no 163	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	Responden no 164	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	Responden no 165	4	3	4	4	4	4	4	4	4
166	Responden no 166	4	4	3	4	4	4	4	4	4
167	Responden no 167	4	4	4	4	4	4	4	4	4
168	Responden no 168	3	3	3	4	3	4	4	3	3
169	Responden no 169	3	3	3	3	2	3	3	3	3
170	Responden no 170	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	Responden no 171	4	4	4	4	4	4	4	4	4
172	Responden no 172	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	Responden no 173	4	4	3	4	4	4	4	4	4
174	Responden no 174	3	4	3	2	3	3	3	3	3
175	Responden no 175	3	3	3	2	3	3	3	3	3
176	Responden no 176	4	4	4	4	4	4	4	4	4
177	Responden no 177	4	4	4	4	4	4	3	4	4
178	Responden no 178	4	4	4	4	4	4	3	4	4
179	Responden no 179	4	4	4	4	4	4	4	4	4
180	Responden no 180	3	4	3	4	3	4	4	4	4
181	Responden no 181	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	Responden no 182	4	4	4	4	4	4	4	4	4
183	Responden no 183	3	4	3	4	4	4	3	4	3
184	Responden no 184	4	4	4	4	4	4	4	4	4
185	Responden no 185	4	4	4	4	4	4	4	4	4
186	Responden no 186	3	3	3	3	4	3	4	3	4
187	Responden no 187	3	3	3	3	3	3	4	3	3
188	Responden no 188	3	3	3	3	3	3	4	3	4
189	Responden no 189	4	4	3	3	3	3	4	3	3
190	Responden no 190	4	4	4	4	4	4	4	4	4
191	Responden no 191	4	4	4	4	4	4	4	4	4
192	Responden no 192	4	4	3	3	4	4	4	4	4
193	Responden no 193	4	4	4	3	4	4	4	4	4
194	Responden no 194	4	4	4	3	4	4	4	4	4
195	Responden no 195	4	4	4	3	4	4	4	4	4
196	Responden no 196	4	4	4	4	4	4	4	4	4
197	Responden no 197	4	4	3	4	4	4	4	4	4
198	Responden no 198	4	4	4	4	4	4	4	4	4
199	Responden no 199	4	4	4	4	4	4	4	4	4
200	Responden no 200	3	3	3	4	4	4	4	4	4
201	Responden no 201	4	3	3	4	4	4	4	4	4
202	Responden no 202	4	4	3	4	4	4	4	4	4

No	Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
203	Responden no 203	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	Responden no 204	4	4	4	4	4	4	4	4	4
205	Responden no 205	4	4	4	4	4	4	4	4	4
206	Responden no 206	3	3	3	3	3	3	3	3	3
207	Responden no 207	4	4	3	3	4	4	4	3	4
208	Responden no 208	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	Responden no 209	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	Responden no 210	4	3	4	4	4	4	4	4	4
211	Responden no 211	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	Responden no 212	4	3	3	4	4	4	4	4	4
213	Responden no 213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	Responden no 214	4	4	4	4	4	4	4	4	4
215	Responden no 215	3	3	3	3	3	3	3	3	4
216	Responden no 216	4	3	4	4	4	4	4	4	4
217	Responden no 217	4	4	4	4	4	4	4	4	4
218	Responden no 218	3	3	3	3	3	3	3	3	3
219	Responden no 219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	Responden no 220	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	Responden no 221	4	3	3	3	3	3	3	3	3
222	Responden no 222	3	3	3	3	3	3	3	3	4
223	Responden no 223	4	4	4	3	3	4	4	4	4
224	Responden no 224	3	3	3	3	3	3	3	3	3
225	Responden no 225	3	3	3	4	3	3	4	3	4
226	Responden no 226	4	3	4	4	4	4	4	3	4
227	Responden no 227	4	4	3	4	4	3	4	3	4
228	Responden no 228	3	3	3	3	3	3	3	3	3
229	Responden no 229	3	3	3	3	3	3	4	4	3
230	Responden no 230	3	3	3	3	3	3	3	3	3
231	Responden no 231	4	4	4	4	3	3	4	4	4
232	Responden no 232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	Responden no 233	4	4	4	4	3	4	4	4	4
234	Responden no 234	4	4	3	4	4	3	3	3	4
235	Responden no 235	3	3	3	3	3	3	3	3	3
236	Responden no 236	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Nilai Per Unsur		883	879	831	842	871	884	893	877	884
Nilai Rata Rata Per Unsur		3,74	3,72	3,52	3,57	3,69	3,75	3,78	3,72	3,75
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)		0,416	0,414	0,391	0,396	0,410	0,416	0,420	0,413	0,416
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)		92,33	3,69							
Mutu Pelayanan		A	Sangat Baik							

Lampiran 6. Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Lingkup Ditjen PKH

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MANDIRI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025**

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan penilaian Zona Integritas (ZI) mandiri di lingkup Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan hasil sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Unit Lokus Evaluasi	Nilai				Keterangan
		Pengungkit	Pelayanan Publik Yang Prima	Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Total	
1.	Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH)	56,87 (94,78%)	15,75 (90%)	20,11 (89,39%)	92,73	Pembangunan Zona Integritas pada BPMSPH telah diimplementasi dengan baik sehingga dapat diusulkan WBBM

Berita acara Penilaian Zona Integritas ini telah disetujui oleh Koordinator Tim Evaluator ZI Mandiri lingkup UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pimpinan Unit lokus evaluasi.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala BPMSPH

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001

Koordinator Penilai,



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Lampiran 7. Jenis Pengujian Mutu Produk Peternakan Tahun 2025

Jenis Pengujian	Grand Total
Kadar Protein Kjeldahl	245
Organoleptik Daging	245
Kadar Lemak Soxhlet	228
pH Potensiometri	210
Kadar Abu (Ash Content) Gravimetri (Proksimat)	203
Kadar Air (Moisture Content) Gravimetri (Proksimat)	200
Kesegaran Susu Segar Uji Alkohol	127
Konsistensi Produk Organoleptik	44
Uji Proximat Susu Segar Milk Analyzer	32
Organoleptik Telur	31
Sukrosa Titrimetri	28
Organoleptik Susu	26
Laktosa Titrimetri	22
Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂) Kualitatif	18
Tinggi Kantung Hawa Telur Kuantitatif	17
Indeks Kuning Telur Kuantitatif	17
Indeks Albumin Kuantitatif	17
Uji Awal Kebusukan (Postma)	17
Organoleptik Jeroan	16
Kesempurnaan Pengeluaran Darah Malachite Green	14
Organoleptik Madu	13
Organoleptik Sarang Burung Walet	12
Hidroksimetilfurfural HPLC	10
Berat Jenis Susu Lactodensimeter	8
Enzim Diastase Spektrofotometri	7
Gula Pereduksi Titrimetri	6
Kolesterol Total HPLC	5
Organoleptik Karkas dan Daging Ayam Ras	4
Organoleptik Produk Olahan	3
Uji Awal Kebusukan (Uji Eber)	2
Telur Uji Candling	2
Uji Didih Susu Kualitatif	2
Organoleptik Telur Asin	1
Titration Keasaman (Titratable acidity) Titrimetri	1
Insolubility Index Volumetri	1
	1834

Lampiran 8. Data komoditas Sampel Pengujian Produk Peternakan

Jenis Sampel	Grand Total
Daging Ayam	843
Daging sapi	297
Susu segar sapi	114
Telur Ayam	82
Susu segar kambing	80
Madu -	75
Susu segar -	73
Susu pasteurisasi sapi	30
Daging kerbau	22
Sarang walet Burung	20
Susu fermentasi (yoghurt) -	18
Madu lebah	18
Pet Food	12
Susu sapi	11
Jeroan sapi	10
Pakan hewan	8
Daging domba	8
Susu bubuk -	7
Daging babi	6
Nuget Ayam	6
Produk olahan daging -	6
Daging kambing	5
Daging Bebek	5
Telur ayam kampung	5
Telur Bebek	5
Mechanically deboned meat (MDM) -	5
Telur Ayam Ras	4
Hati Ayam	4
Ampela/Gizzard Ayam	4
Mechanically deboned meat (MDM) Ayam	4
Sosis sapi	4
Jantung Ayam	4
Sosis Ayam	4
Telur Burung Puyuh	4
Hati sapi	4
Sarang walet Burung Walet	4
Susu kerbau	3
Daging -	3
Olahan telur Burung Puyuh	2
Susu steril/UHT -	2

Jenis Sampel	Grand Total
Produk olahan daging utuh/potongan Ayam	2
Produk olahan daging Ayam	2
Kaki sapi	1
Kulit sapi	1
Daging giling sapi	1
Produk olahan daging domba	1
Air	1
Susu pasteurisasi -	1
Telur asin Bebek	1
Susu segar kuda	1
Daging beku karkas Ayam	1
Grand Total	1834

Lampiran 9. Data Kelompok Ternak Unggas

NO	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Kelompok	Terdistribusi				Realisasi (%)
						Kandang	Ayam (Ekor)	Pakan (kg)	Vitamin dan	
1	Banten	Lebak	Leuwidamar	Leuwidamar	Paduluran HK	1	600	5.400	1	100
2	Banten	Lebak	Leuwidamar	Cisimeut	Peternak Sejahtera	1	600	5.400	1	100
3	Banten	Lebak	Leuwidamar	Cisimeut	Karya Tani	1	600	5.400	1	100
4	Banten	Lebak	Cipanas	Girilaya	Cilisung 1	1	600	5.400	1	100
5	Banten	Lebak	Sajira	Sajiramekar	Mitra Gembala	1	600	5.400	1	100
6	Banten	Lebak	Warunggunung	Cibuah	Sinom Makmur	1	600	5.400	1	100
7	Banten	Lebak	Banjarsari	Keusik	Bersodara	1	600	5.400	1	100
8	Banten	Lebak	Sajira	Sukamarga	Cikenat	1	600	5.400	1	100
9	Banten	Pandeglang	Koroncong	Paniis	Nangor Jaya	1	600	5.400	1	100
10	Banten	Pandeglang	Koroncong	Paniis	Paniis Jaya	1	600	5.400	1	100
11	Banten	Pandeglang	Koroncong	Pakuluran	Haskay Tani	1	600	5.400	1	100
12	Banten	Pandeglang	Koroncong	Pasirkarag	Karya Makmur 1	1	600	5.400	1	100
13	Banten	Pandeglang	Koroncong	Pasirjaksa	Tani luhur 1	1	600	5.400	1	100
14	Banten	Pandeglang	Koroncong	Karangsetra	Mandiri II	1	600	5.400	1	100
15	Banten	Pandeglang	Koroncong	Paniis	Sumber Tani	1	600	5.400	1	100
16	Banten	Lebak	Leuwidamar	Cibungur	Sinar Bungur	1	600	5.400	1	100
17	Banten	Lebak	Leuwidamar	Cibungur	Bungur Raya	1	600	5.400	1	100
18	Lampung	Tulang Bawang	Menggala Timur	Kampung Bedarou Indah	Kurnia Jaya	1	600	5.400	1	100
19	Lampung	Tulang Bawang	Menggala Timur	Kampung Bedarou Indah	Mukti Jaya 1	1	600	5.400	1	100
20	Lampung	Lampung Timur	Waway Karya	Negara Batin	Karya Manunggal	1	600	5.400	1	100
21	Lampung	Lampung Timur	Jabung	Adiluhur	Setia Maju III	1	600	5.400	1	100
Total						21	12.600	113.400	21	

Lampiran 10. Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

Penggunaan SBK :

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/10	12
1	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	606.482	6.147.216.493	16.505,00	372.446	Ya
2	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	WA Program Dukungan Manajemen	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	581.000	4	145.250	Ya
3	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	WA Program Dukungan Manajemen	1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Besar [Orang]	5.700.000	500.000	62	8.065	Ya
4	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	WA Program Dukungan Manajemen	1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	SBKU	1787.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	0	1	0	Tidak
5	06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	WA Program Dukungan Manajemen	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon I/ Setingkat [Dokumen]	508.000.000	1.361.000	12	113.417	Ya

Sumber : SMART Kemenkeu

Efisiensi SBK

No.	Satker	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	TVRO	RVRO	Realisasi	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Efisiensi SBK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11=6-10	12=10/6	13	14
1	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1786.QJA.001 Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan (Produk)	SBKK	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	606.482	11.750	16.505	6.147.216.493	372.446	234.036	38,59	38,59	24,65
2	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1787.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	4	4	581.000	145.250	479.854.750	99,97	20	
3	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1787.EBC.954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis	5.700.000	62	62	500.000	8.065	5.691.935	99,86	20	
4	567275 BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	1787.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	SBKU	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Eselon II/ Setingkat [Dokumen]	508.000.000	12	12	1.361.000	113.417	507.886.583	99,98	20	

Sumber : SMART Kemenkeu

Lampiran 11. Perkembangan Sistem Informasi Spill B (Semula Menjadi)

Semula	Menjadi
- Hanya ada 2 menu Pelayanan (pelayanan magang dan sewa gedung bimtek) - Terdapat pakta integritas, untuk tidak melaksanakan suap pungli, gratifikasi - Terdapat Riwayat pemohon 	- Penambahan menu layanan Uji profesiensi - Pemisahan layanan magang dinas dan magang/pjl pelajar/mahasiswa - Terdapat informasi Standar Pelayanan Publik (SPP) - Terdapat Informasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan - Terdapat Kanal Lapor Pengaduan Masyarakat 

Lampiran 12. Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2025

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I 2025



Nomor : B-08010/RC.320/F5.A/01/2025 Bogor, 08 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja B03 BPMSPH TA.2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu
di
Jakarta.

Menindaklanjuti rencana aksi capaian kinerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja B03 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai

Dinar Hadi Wahyu Hartawan
NIP 198103272006041001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA B 03 TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN		TARGET B03		REALISASI		%	KETERANGAN	KENDALA DAN TINDAK LANJUT
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,6	skala likert	3,45	skala likert	3,67	skala likert	106%	Survei layanan kepuasan masyarakat dilakukan setelah pengguna layanan memperoleh layanan.	Nilai IKM diatas target. Survei IKM dilakukan secara online. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan survei IKM
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	100%	Penilaian pembangunan Zona Integritas dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW I belum terdapat nilai pembangunan ZI	Belum ada penilaian pembangunan ZI oleh evaluator, kegiatan dalam proses pengumpulan eviden. Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal penilaian dari dari pusat/ Tim Penilai Internal (Inspektorat)
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.404	Produk	2.767	Produk	3623	Produk	120%	pengujian produk hewan berupa sampel aktif (sampel produk hewan yang diambil dari unit usaha) dan pasif (sampel produk hewan yang dikirim dari unit usaha atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan)	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian, realisasi melebihi target karena adanya permohonan pengujian (sampel pasif).
3	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	100%	Pelaksanaan layanan BMN	Layanan BMN terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada kendala
		Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	100%	Pelaksanaan layanan perencanaan dan anggaran	Layanan umum terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala
		Layanan Perkantoran	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100%	pelaksanaan layanan perkantoran (gaji dan operasional kantor)	layanan perkantoran berjalan baik tanpa kendala
		Layanan Manajemen SDM	62	Layanan	25	Layanan	25	Layanan	100%	Pelaksanaan layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai	Layanan Manajemen SDM terlaksana dengan baik tidak ada kendala
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi	Layanan pemantauan dan evaluasi berjalan baik
		Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	pelaksanaan layanan manajemen keuangan	Layanan manajemen keuangan berjalan baik

Bogor, 8 April 2025
Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

dr. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198127032006041001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmaph@pertanian.go.id



Nomor : B-09001 /RC.320/F5.A/07/2025 Bogor, 09 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja B06 BPMSPH TA.2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
JL.Harsono RM No. 3 Pasar Minggu
di
Jakarta.

Menindaklanjuti rencana aksi capaian kinerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja B06 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2025, sebagaimana terlampir .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wahyu Hartawan
03272006041001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pengli dan Gratifikasi"



LAPORAN CAPAIAN KINERJA B 06 TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		TARGET B06	REALISASI B06		REALISASI TAHUN 2025		KETERANGAN	KENDALA DAN TINDAK LANJUT
							%		%		
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,6	skala likert	3,45	3,73	108%	3,7	103%	Survei layanan kepuasan masyarakat dilakukan setelah pengguna layanan memperoleh layanan.	Nilai IKM diatas target. Survei IKM dilakukan secara online. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan survei IKM
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	Nilai						Penilaian pembangunan Zona Integritas dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW II belum terdapat nilai pembangunan ZI	Belum ada penilaian pembangunan ZI oleh evaluator, kegiatan dalam proses pengumpulan eviden. Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal penilaian dari dari pusat/ Tim Penilai Internal (Inspektorat)
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600	ekor						telah selesai dilakukan verifikasi CPCL terhadap 17 KT calon penerima bantuan dan survei penyedia dan harga	Pengadaan belum dapat dilakukan karena masih dalam proses koordinasi pendampingan oleh Tim Itjen dan penyusunan KAK pengadaan, survey penyedia dan harga
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750	Produk	2.515	3702	147%	7325	62%	pengujian produk hewan berupa sampel aktif (sampel produk hewan yang diambil dari unit usaha) dan pasif (sampel produk hewan yang dikirim dari unit usaha atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan)	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian, realisasi melebihi target karena adanya permohonan pengujian (sampel pasif).
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4	Layanan	1	1	100%	2	50%	Pelaksanaan layanan BMN	Layanan BMN terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada kendala
		Layanan Umum	1	Layanan	1	1	100%	1	100%	Pelaksanaan layanan perencanaan dan anggaran	Layanan umum terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala
		Layanan Perkantoran	2	Layanan	1	1	100%	1	50%	pelaksanaan layanan perkantoran (gaji dan operasional kantor)	layanan perkantoran berjalan baik tanpa kendala
		Layanan Manajemen SDM	62	Layanan	18	18	100%	43	69,35%	Pelaksanaan layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai	Layanan Manajemen SDM terlaksana dengan baik tidak ada kendala
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	1	100%	1	100%	pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi	Layanan pemantauan dan evaluasi berjalan baik
		Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen	3	3	100%	6	50%	pelaksanaan layanan manajemen keuangan	Layanan manajemen keuangan berjalan baik
Rata-rata Capaian Output							106,91%		73,06%		

Realisasi Belanja sd Juni 2025

NO	Jenis belanja	Pagu	Pagu Blokir *	Pagu - blokir	Realisasi	%	Kendala	Tindak Lanjut
1	1785	Rp 4.195.800.000		Rp 4.195.800.000	Rp 35.809.967,00	0,85%	Pengadaan belum dapat dilakukan karena masih dalam proses koordinasi pendampingan oleh Tim Itjen dan penyusunan KAK pengadaan, survey penyedia dan harga	memantau proses penyusunan KAK dan ketersediaan barang di penyedia
2	1786	Rp 6.955.267.000		Rp 6.955.267.000	Rp 973.199.447	13,99%	banyak bahan uji atau media inden lebih dari 2 bulan	koordinasi dengan penyedia terkait ketersediaan bahan uji
3	1787	Rp 10.566.280.000	Rp 40.007.000	Rp 10.526.273.000	Rp 4.950.295.888	47,03%	pelaksanaan layanan dukungan manajemen berjalan baik tidak ada kendala	-
Total		Rp 21.717.347.000	Rp 40.007.000	Rp 21.677.340.000	Rp 5.959.305.302	27,49%		

*Keterangan
pagu blokir, penghematan perjalanan dinas


 2025
 Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi
 Produk Pertanian
 dan Perikanan
 drh. Dwi Nugroho Wahyu Hartawan, M.Sc
 32006041001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PERUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8363712 Fax : (0251) 8363712 E-mail : bqmaph@pertanian.go.id



Nomor : B-09005/RC.320/F5.A/10/2025 Bogor, 09 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja B09 BPMSPH TA.2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu
di Jakarta.

Menindaklanjuti rencana aksi capaian kinerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja B09 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai

Dinar Hadi Wahyu Hartawan
NIP 198103272006041001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"



LAPORAN CAPAIAN KINERJA B 09 TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET B09	REALISASI B09		REALISASI TAHUN 2025		KETERANGAN	KENDALA DAN TINDAK LANJUT
						%		%		
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,6 skala likert	3,6	3,69	103%	3,7	103%	Survei layanan kepuasan masyarakat dilakukan setelah pengguna layanan memperoleh layanan.	Nilai IKM diatas target. Survei IKM dilakukan secara online. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan survei IKM
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80 Nilai	0	0	100%	0	100%	Penilaian pembangunan Zona Integritas dilakukan pada TW IV, sehingga pada TW III belum terdapat nilai pembangunan ZI	Belum ada penilaian pembangunan ZI oleh evaluator, kegiatan dalam proses pengumpulan eviden. Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal penilaian dari dari pusat/ Tim Penilai Internal (Inspektorat)
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600 ekor		0	100%	0	100%	Proses Pengadaan Brang/Jasa telah selesai dilakukan	Distribusi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750 Produk	1750	1755	100%	11459	98%	pengujian produk hewan berupa sampel aktif (sampel produk hewan yang diambil dari unit usaha) dan pasif (sampel produk hewan yang dikirim dari unit usaha atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan)	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan	1	1	100%	3	75%	Pelaksanaan layanan BMN	Layanan BMN terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada kendala
		Layanan Umum	1 Layanan		1	100%	1	100%	Pelaksanaan layanan perencanaan dan anggaran	Layanan umum terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala
		Layanan Perkantoran	2 Layanan	1	1	100%	1	50%	pelaksanaan layanan perkantoran (gaji dan operasional kantor)	layanan perkantoran berjalan baik tanpa kendala
		Layanan Manajemen SDM	62 Layanan	9	11	122%	54	87,10%	Pelaksanaan layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai	Layanan Manajemen SDM terlaksana dengan baik yaitu layanan pengurusan calon P3K paruh waktu dan layanan pengurusan PAK
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1	1	100%	1	100%	pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi	Layanan pemantauan dan evaluasi berjalan baik
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	3	3	100%	9	75%	pelaksanaan layanan manajemen keuangan	Layanan manajemen keuangan berjalan baik
		Rata-rata Capaian Output				102,50%		88,74%		

Realisasi Belanja sd September 2025

NO	Jenis belanja	Pagu	Pagu Blokir *		Realisasi	%	Kendala	Tindak Lanjut
1	1785	Rp 4.195.800.000		Rp 4.195.800.000	Rp 1.431.715.339,00	34,12%	Proses Pengadaan Brang/Jasa telah selesai dilakukan	Distribusi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025
2	1786	Rp 9.247.267.000		Rp 9.247.267.000	Rp 3.250.916.384	35,16%	banyak bahan uji atau media inden lebih dari 2 bulan	koordinasi dengan penyedia terkit ketersediaan bahan uji
3	1787	Rp 11.212.759.000	Rp 40.007.000	Rp 11.172.752.000	Rp 7.436.095.789	66,56%	pelaksanaan layanan dukungan manajemen berjalan baik tidak ada kendala	-
Total		Rp 24.655.826.000	Rp 40.007.000	Rp 24.615.819.000	Rp 12.118.727.512	49,23%		

*Keterangan
pagu blokir, penghematan perjalanan dinas

7 Oktober 2025
Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi
Produk Hewan
Ditandatangani Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198127032006041001





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PENERUSAN NOMOR 29 A BOGOR 16161
Telp : (0251) 8377111, 8352712 Fax : (0251) 8352712 E-mail : bpmaph@pertanian.go.id



Nomor : B-08001 /RC.320/F5.A/01/2026 Bogor, 08 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja B12 BPMSPH TA.2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
JL.Harsono RM No. 3 Pasar Minggu
di
Jakarta.

Menindaklanjuti rencana aksi capaian kinerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja B12 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2025, sebagaimana terlampir .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ditandatangani oleh Wahyu Hartawan
NIP. 193272006041001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.



"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"



LAPORAN CAPAIAN KINERJA B 12 TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		TARGET B12	REALISASI B12/TW IV		REALISASI TAHUN 2025		KETERANGAN	KENDALA DAN TINDAK LANJUT
							%		%		
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang Diberikan	3,6	skala likert	3,6	3,69	103%	3,7	103%	Survei layanan kepuasan masyarakat dilakukan setelah pengguna layanan memperoleh layanan.	Nilai IKM diatas target. Survei IKM dilakukan secara online. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan survei IKM
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor	80	Nilai	80	92,73	116%	92,73	116%	Penilaian pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh evaluator mandiri lingkup Ditjen PKH	Nilai pembangunan ZI di atas target
2	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Ternak Unggas	12.600	ekor	12.600	12.600	100%	12.600	100%	Proses Pengadaan Brang/Jasa telah selesai dilakukan	pelaksanaan pengadaan dan disribusi ternak sesuai prosedur
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Uji Keamanan dan Mutu Produk Hewan	11.750	Produk	5.000	5.046	101%	15.362	131%	pengujian produk hewan berupa sampel aktif (sampel produk hewan yang diambil dari unit usaha) dan pasif (sampel produk hewan yang dikirim dari unit usaha atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan)	Pelaksanaan pengujian sesuai dengan prosedur pengujian
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4	Layanan	1	1	100%	4	100%	Pelaksanaan layanan BMN	Layanan BMN terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada kendala
		Layanan Umum	1	Layanan	1	1	100%	1	100%	Pelaksanaan layanan perencanaan dan anggaran	Layanan umum terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada kendala
		Layanan Perkantoran	2	Layanan	1	1	100%	2	100%	pelaksanaan layanan perkantoran (gaji dan onerasional kantor)	layanan perkantoran berjalan baik tanpa kendala
		Layanan Manajemen SDM	62	Layanan	19	19	100%	62	100,00%	Pelaksanaan layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai	Layanan Manajemen SDM terlaksana dengan baik yaitu layanan pengurusan calon P3K paruh waktu dan layanan pengurusan PAK
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	1	100%	1	100%	pelaksanaan layanan pemantauan dan evaluasi	Layanan pemantauan dan evaluasi berjalan baik
		Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen	3	3	100%	12	100%	pelaksanaan layanan manajemen keuangan	Layanan manajemen keuangan berjalan baik
Rata-rata Capaian Output							101,93%	104,94%			

Realisasi Belanja sd Desember 2025

NO	Jenis belanja	Pagu	Realisasi	Pagu - blokir	%	Kendala	Tindak Lanjut
1	1785	Rp 4.195.800.000	Rp 3.941.154.954		93,93%	Tidak ada kendala	Proses pengadaan dan distribusi bibit ternak unggas terlaksanan sesuai rencana
2	1786	Rp 9.575.146.000	Rp 9.314.289.922		97,28%	banyak bahan uji atau media inden lebih dari 2 bulan	koordinasi dengan penyedia terkit ketersediaan bahan uji
3	1787	Rp 11.482.759.000	Rp 11.159.601.973	Rp 40.007.000	97,53%	pelaksanaan layanan dukungan manajemen berjalan baik tidak ada kendala	-
Total		Rp 25.253.705.000	Rp 24.415.046.849	Rp 40.007.000	96,83%		



 Bogor, 15 Januari 2026
 Kepala Balai Pengujian Mutu
 dan Serifikasi Produk Hewan
 Dr. Diah Pertiwi
 Hartawan, M.Sc
 NIP. 198127032006041001